No. 129 September - Oktober 2016

Sakriver www.bakti.or.id MEMAHAMI VIII TO MEMAHAMI VIII







ISSN 1979-777X www.bakti.or.id Editor M. YUSRAN LAITUPA VICTORIA NGANTUNG SYAIFULLAH

Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book
Database & Sirkulasi
A. RINI INDAYANI

Design & Layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi

JI. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas. BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Contributing to BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BAKTINews

Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews

September - Oktober 2016

No. 129

- Merayakan 22 Inspirasi Pembangunan Provinsi NTT Oleh Sumarni Ariyanto
- Praktik Cerdas Rekatkan Budaya Pada Anak di Lingkungan Sekolah
- MCA-Indonesia Pertemuan Kepala Bappeda dan Green News Café Oleh Syaifullah
- 12 Menuju Layanan Kesejahteraan Anak yang Holistik dan Komprehensif

Oleh Mugniar

MCA-Indonesia

Mengukur Efektivitas Aktivitas Pembuatan Video Animasi dan Komik "Energi Baru Terbarukan" dari Proyek MCA-I BaKTI

Oleh Ricky Djojobo

- Hasil Tangan kotor Oleh W.I.M Poli
- Advokasi Kebijakan Publik **Yang Feminis** (Bagian 1) Oleh Lusia Palulungan & M. Ghufran H. Kordi K.
- MCA-Indonesia PLTBG Rantau Sakti; Limbah Berbahaya Yang Jadi Cahaya Oleh Syaifullah
- Mati Sia-Sia: Kegagalan Sistem Kesehatan di Papua (Bagian 2)

Oleh Bobby Anderson

- **Update BatukarInfo**
- Kegiatan BaKTI
- Info Buku
- Foto Cover : Ichsan Djunaed







FESTIVAL PRAKTIK CERDAS PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA TIMUR 2016

MERAYAKAN **22 INSPIRASI** PEMBANGUNAN **PROVINSI NTT**

Oleh Sumarni Arianto



mpat orang anak perempuan dan tujuh orang anak laki-laki berpakaian tradisional khas Sikka berbaris rapi memasuki ruang pertemuan Hotel Neo Kupang pagi itu. Mereka mengenakan kain tenun khas Timor berupa sarung dan selendang serta penutup kepala untuk anak laki-laki mereka tampak cantik dan gagah.

Mereka adalah paduan suara dari Sekolah Dasar Aiwuat, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan diiringi tabuhan bas berupa gitar besar yang dibaringkan di lantai berpadu petikan gitar dan ukulele, mereka menyanyikan dua lagu daerah berjudul Maumere Manise dan Mior Dadin dengan riang dan lantang. Nyanyian kesebelas anak Sikka ini sekaligus mengantar pembukaan Festival Praktik Cerdas Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2016, dengan tema "Inspirasi dan Kontribusi dari

Desa untuk Mewujudkan Masyarakat NTT yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis".

Pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2016 bertempat di Hotel Neo Aston, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) dan Yayasan BaKTI menggelar Festival Praktik Cerdas Pembangunan Nusa Tenggara Timur 2016, di Kupang, NTT.

Kegiatan ini merayakan 22 Praktik Cerdas yang terjaring melalui serangkaian proses seleksi yang dilakukan secara panel oleh Pemerintah Provinsi NTT, WVI dan BaKTI. Keduapuluh dua praktik cerdas ini merupakan kumpulan praktikpraktik dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan, tata kelola pemerintahan dan perubahan iklim.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan WVI, Agnes Wulandari menyatakan bahwa praktik cerdas pembangunan adalah sebuah upaya yang berhasil dilakukan masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh komunitas di daerah tertentu. Praktik cerdas merupakan solusi yang terbukti berhasil, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Disampaikannya pula bahwa festival ini merupakan hasil kerja sama WVI, Pemprov NTT, pemerintah kabupaten/kota di NTT, Yayasan BaKTI, dan masyarakat.

Secara resmi, kegiatan yang berlangsung dua hari ini dibuka oleh Gubernur Provinsi NTT yang diwakili oleh Bapak Ir. Wayan Darmawa, Kepala BAPPEDA Provinsi NTT. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada WVI dan mitra kerjanya atas terselenggaranya kegiatan Festivalini.

Menurut Bapak Wayan Darmawa, pihaknya akan berupaya agar praktik cerdas mendapat dukungan dan bisa direplikasi oleh pemerintah pusat. Gubernur NTT, akan berupaya untuk berdialog dengan institusi terkait seperti Bappenas, Kemendikbud, untuk mengajukan praktik cerdas ini sebagai referensi, tambah pak Wayan.

Sebagai rangkaian dari kegiatan pembukaan, sambutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga dibacakan. Hadir sebagai perwakilan yakni Bapak Ir. Rusnadi Padjung.

Dengan dikemas dalam bentuk talkshow yang dipandu oleh Luna Vidia dari BaKTI, show case dari 22 praktik cerdas dibuat dalam bentuk

SELENGKAPNYA. 22 PRAKTIK CERDAS YANG TAMPIL DALAM FESTIVAL INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Rekatkan Budaya Pada Anak di Lingkungan Sekolah
- 2. Pusat Belajar Kakao, Jembatani Kesejahteraan Petani
- 3. Kursus Potensi Diri Antar Remaja Jadi Agen Perubahan
- 4. Secercah Harapan Anak-Anak Doreng dengan Mior Dadin
- 5. Pertanian Organik, Berkah bagi Warga Desa Sillu
- 6. Menggagas Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat
- 7. Saatnya Mendengarkan Suara Anak
- 8. Ketika Air Bersih Menjawab Penantian Warga Ilebura
- 9. Skol Amnasit Bimbing Orang Tua Mengasuh Anak
- 10. Transparansi dan Akuntabilitas a la Desa Nita
- 11. Suara Warga Antar Peningkatan Layanan KIA
- 12. Pelihara Hutan untuk Anakmu dengan Metode Palotang
- 13. Simpan Pinjam Tenaga Kerja Kelompok Tani
- 14. Buku Besar Tumbuhkan Kreativitas dan Minat Baca
- 15. Credit Union Letekonda Bebaskan Warga dari Rentenir
- 16. Bank Sampah Ajarkan Anak Menabung
- 17. Ketika Air Sudah Dekat
- 18. Memenuhi Kebutuhan Tolnaku dengan Jebakan Air
- 19. Mengembalikan Kejayaan Pangan Lokal
- 20. Pusaka Leluhur untuk Kesejahteraan Anak
- 21. Perempuan Tangguh yang Mengubah Metode Tanam
- 22. Tekan Gizi Buruk dengan Kebun Gizi

talkshow interaktif yang dibagi ke dalam 6 sektor yakni pendidikan, ekonomi, partisipasi anak dan pemberdayaan perempuan, kesehatan, tata kelola pemerintahan dan perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Tampil dalam talkshow pertama yakni tiga praktik cerdas dari tiga sektor yang berbeda yaitu Kebun Gizi dari Sumba Barat, Koperasi Tenaga Kerja dari Flores Timur dan Merekatkan Budaya Pada Anak di Sekolah dari kabupaten Sikka. Bertindak sebagai penanggap dalam sesi ini adalah Bapak Ir. Rusnadi Padjung dari Kementerian Desa dan Bapak Ir. Wayan Darmawa dari Bappeda NTT.

Selain perwakilan BaKTI, tampil sebagai pemandu diskusi dalam talkshow yang digelar dua hari ini adalah perwakilan dari LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) lokal di NTT seperti CIS Timor serta perwakilan dari media.

Hal yang paling menarik dari festival ini adalah presentasi dari bapak ibu praktisi praktik cerdas yang begitu antusias dan bersemangat menceritakan hal-hal yang membanggakan dari praktik cerdas yang mereka lakukan, tantangantantangan apa saja yang telah berhasil mereka taklukkan serta harapan-harapan mereka ke





depan untuk kemajuan dan kesuksesan kegiatan mereka.

Tidak ada yang menyangka, seorang ibu sederhana nan bersahaja seperti Mama Neolako dari Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan dengan sangat fasih serta sedikit jenaka mampu menjelaskan dengan baik rincian kegiatan yang dilakukannya bersama warga desanya sehingga bisa membuat hasil tanaman pekarangannya seperti buah, sayur dan pangan lainnya meningkat.

Festival ini dihadiri kurang lebih 400an orang yang terdiri dari perwakilan berbagai unsur pelaku pembangunan di NTT seperti Perwakilan pemerintah provinsi NTT, Perwakilan SKPD dari 22 Pemerintah Kabupaten / Kota di Propinsi NTT, Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di wilayah NTT serta masyarakat dampingannya, Industri Kreatif dan dunia usaha yang memiliki CSR di wilayah









NTT, Universitas dan lembaga penelitian, media nasional dan lokal.

Di penghujung acara, Petrus Keron selaku Ketua Tim Action Research membacakan tiga rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai hasil dari pertemuan dan diskusi selama 2 hari pelaksanaan festival. Tiga rekomendasi itu adalah di bidang pendidikan, tata kelola desa, dan ekonomi.

Dalam rekomendasinya di bidang pendidikan, peserta festival berharap pemerintah kabupaten bisa mereplikasi spirit dan pendidikan karakter kontekstual dengan spirit kulababong atau musyawarah di kabupaten Sika. Di bidang tata kelola desa, peserta meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi mengembangkan prinsip tata kelola desa melalui panduan modul pembelajaran dan dukungan regulasi. Adapun di bidang ekonomi, peserta meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi mengembangkan keterhubungan antar sektor untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara resmi, kegiatan ini ditutup oleh Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili oleh Bapak Ir. Wayan Darmawa. Dalam penutupannya beliau menyatakan bahwa ke depannya untuk keberlanjutan pelaksanan festival praktik cerdas NTT akan dikaitkan dengan hal yang fundamental seperti melaksanakannya sebagai rangkaian dari ulang tahun NTT yang jatuh pada bulan Desember setiap tahunnya sehingga bisa terus dilaksanakan. Harapannya dari praktik cerdas yang tampil bisa jadi referensi modelmodel pembangunan yang bisa direplikasi bukan hanya di NTT tapi juga di skala nasional atau bahkan oleh negara-negara lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang praktik cerdas di Kawasan Timur Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Rekatkan Budaya Pada Anak di Lingkungan Sekolah



ndividu yang paling rentan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anak, termasuk di Sikka yang anak-anaknya dari berbagai kategori usia yang dapat dengan mudah mengakses hal-hal baru tanpa bimbingan dan proses saringan dari orang dewasa.

Sementara di sekolah-sekolah, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka tanpa pendampingan dari guru, karena kualitas sekolah yang menurun. Berdasarkan laporan Hasil Penelitian Etnografi di Kabupaten Sikka pada Mei 2012 oleh DED, diketahui ada tiga komponen yang melatarbelakangi keterpurukan pendidikan di sekolah.

Dari sisi masyarakat, kepedulian terhadap pendidikan di sekolah semakin rendah dan filosofi pemahaman tentang adat atau budaya mengalami kemerosotan. Hal ini karena masyarakat terjebak pada pesta, bukan pada esensi/makna adat istiadat tersebut, sehingga pendapatan masyarakat terkuras pada pesta.

Sedangkan dari sisi guru, terdapat banyak sekali guru-guru yang tidak paham tentang budaya, sehingga sulit mentransfer pengetahuan budaya kepada anak termasuk nilai-nilai positif yang terkandung dalam budaya. Bahkan beberapa tahun terakhir, tempat tinggal guru tidak dekat dengan sekolah, sehingga hubungan dengan anak dan masyarakat semakin renggang, dimana hubungan guru dan siswa hanya sebatas tugas dan tanggungjawab fungsional saja.

Terakhir dari sisi anak sendiri, seperti yang tergambar dari data kelulusan siswa Kabupaten Sikka, tingkat kelulusan SMA/SLA pada 2009 masih sangat rendah yakni 44,87 persen dari total siswa 1.569. Kemudian pada 2010 sebanyak 1.780 siswa se-kabupaten Sikka yang mengikuti UN, namun hanya 324 siswa yang dinyatakan lulus, sisanya 1.456 siswa tidak lulus.

Permasalahan lainnya yang ditemukan

Banyak sekali guru-guru yang tidak paham tentang budaya, sehingga sulit mentransfer pengetahuan budaya kepada anak termasuk nilai-nilai positif yang terkandung dalam budava

adalah pendidikan bahasa lokal sudah hilang dari sekolah, pendidikan seni dan budaya juga berkurang dan kecintaan kepada tanah dan leluhur juga sudah berkurang. Keprihatinan di atas harus dijawab dengan program yang strategis agar dapat menyelesaikan akar-akar persoalan pendidikan di Kabupaten Sikka.

Selain kondisi nyata terkini terkait prestasi akademis, lapisan-lapisan sejarah yang tersedimentasi dalam pembentukan masyarakat Sikka masih menyisakan potensi munculnya konflik baik horizontal, vertikal, maupun gabungan keduanya.

Sebenanya ada mekanisme penyelesaian konflik yang berakar mendalam dalam budaya masyarakat Sikka. Kulababong (musyawarah) menjadi proses penyelesaian konflik nonlitigasi yang sudah teruji efisien dan efektif. Hanya saja ketika birokrasi yang formal semakin menjadi arus utama penataan kehidupan bersama, model-model penyelesaian secara adat semakin mundur.

Karena itu, perlu tindakan nyata agar masyarakat kembali dapat membangun kehidupan bersama yang lebih baik, adil, dan beradab sehingga masyarakat sungguhsungguh mendapatkan keadilan yang sebenarbenarnya.

Salah satu cara untuk menghidupkan kembali semangat "kulababong" adalah melalui pendidikan di sekolah. Nilai-nilai yang sudah tumbuh subur dalam rahim kultur masyarakat Sikka ini perlu dihidupkan lagi dan dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. (Ferry T. Indratno, Mei 2012)



Mencermati hati itu, Wahana Visi Indonesia –ADP Sikka berkomitmen untuk terlibat aktif dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Sikka, juga berkontribusi positif untuk mengembalikan anak-anak Sikka menemukan jati diri sebagai orang Sikka yang mempunyai kepribadian dengan nilai-nilai luhur warisan leluhur seperti saling menghormati, musyawarah untuk mufakat, kebersamaan, kerja keras, nilai juang di dalam kehidupan dan lainlain.

Untuk mencapai itu, perlu ada kerjasama yang harus dibangun, dalam hal ini WVI melakukan komunikasi intensif dengan para mitra seperti Dinas PPO Kab. Sikka, Komdik Keuskupan Maumere, Sanpukat, konsultan pendidikan TRUE dan DED, bahkan Pemda Provinsi NTT terlibat aktif untuk mewujudkan pendidikan karakter yang kontekstual di Kabupaten Sikka.

Strategi yang disepakati dengan pihak mitra adalah WVI ADP Sikka akan melakukan pendampingan kepada 6 sekolah contoh yang terletak di kecamatan Nita, Lela dan Doreng. Diharapkan selama dan setelah pendampingan Anak-anak Sekolah di Sikka belajar membuat kue adat Bolo Pagar, sebuah upaya untuk mendekatkan anak dengan budayanya.

Sumber foto: http://adpsikkahoro.blogspot.co.id/

terjadi, apabila dianggap berhasil maka mitra lainnya seperti Dinas PPO dan keuskupan akan mereplikasi ke sekolah lainnya.

Contoh bahan ajar dengan menggunakan konteks lokal dilakukan oleh salah seorang guru dari salah satu sekolah percontohan yaitu SDK DU. Di sekolah ini, guru-guru tidak lagi mengajar hanya dengan membaca buku dan hanya di dalam kelas. Saat ini mereka lebih kreatif, mampu melihat benda di alam sekitar dan menariknya menjadi sebuah pembelajaran menarik di kelas.

"Saya sangat senang dengan pendidikan karakter yang diterapkan WVI dan Dinas PPO, ini sangat unik karena sangat menyentuh sekali dengan konteks lokal yang ada, bahkan bisa memperkaya model pembelajaran bagi para guru.", kata Maria Guru di SDK Du.

Melalui pembelajaran ini, anak-anak mulai dibiasakan untuk mencintai alam sekitar mereka, karena alam adalah kelas mereka dan sekaligus ruang bermain mereka. Seperti yang saat ini dilakukan oleh Maria dan anak muridnya, mereka akan belajar tentang konsep bangun ruang dengan membuat kue adat Bolo Pagar.

Bolo Pagar adalah sebuah kue adat Sikka yang biasa disajikan dalam rangkaian acara perkawinan. Kue Bolo Pagar akan disajikan oleh keluarga perempuan saat keluarga laki-laki meminang anak perempuannya. Maknanya adalah layaknya pagar, calon pengantin laki-laki dan keluarga harus menjaga dan melindungi calon pengantin perempuan.

Semakin banyak rekatan atau bentuk yang saling silang akan membuat "pagar" semakin kuat, artinya bila keluarga dan banyak pihak turut mendukung perkawinan ini, maka perkawinan akan sejahtera dan langgeng. Warna-warni dalam kue ini juga memaknakan suka duka yang akan mewarnai sebuah perkawinan.

Selain mengerti tentang bangun ruang, mereka pun belajar tentang makna dari Bolo Pagar ini. Sungguh indah ketika sejak dini anakanak didekatkan dengan budaya dan diajarkan untuk mencintainya.

Hal inilah yang diharapkan oleh semua pihak, karena menjadi pintar bukan hanya membaca dan belajar dalam kelas, namun pengetahuan dari alam sekitar dan konteks setempat akan memberikan pendidikan yang jauh lebih kaya untuk dikembangkan.

Dengan menerapkan pendidikan kontekstual, keunikan yang mulai pudar dan hilang dapat digali kembali dan dikembangkan untuk menunjang potensi, kemampuan serta keterampilan yang berpuncak pada karakter anak. Inilah yang bisa dipelajari anak-anak SDK Dumelalui kue adat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang praktik cerdas di Kawasan Timur Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id





MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA

GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Pertemuan Kepala Bappeda dan Green News Café

Oleh Syaifullah

"Sebelum kita mulai, saya mau bapak dan ibu sekalian membayangkan sebagai sebuah buku dan kita sedang berada di dalam sebuah perpustakaan. Setiap buku memiliki pengetahuannya sendiri-sendiri dan karenanya saya harapkan hari ini dari pagi sampai sore kita akan berbagi pengetahuan," begitu kata Luna Vidya.

Luna Vidya dari BaKTI menjadi pengawal utama acara hari itu, pertemuan Kepala BAPPEDA di 11 provinsi area kerja proyek Kemakmuran Hijau dari Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia). Kesebelas provinsi tersebut adalah; Sumatera Barat, Jambi, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pertemuan yang dihelat di Ruang Banda II Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 29 September 2016 itu dimaksudkan sebagai sarana berbagi pengetahuan antara para kepala dan pejabat BAPPEDA di area kerja proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa menjabarkan beberapa tujuan lain yang juga dianggap penting dari pertemuan tersebut, seperti: untuk mengetahui perkembangan terakhir dari program pengembangan energi terbarukan yang terdapat di masing-masing daerah serta infrastruktur penunjangnya, mengidentifikasi dukungan kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di masingmasing daerah, membangun efektivitas koordinasi dan sinergi perencanaan pengembangan energi terbarukan dengan pemerintah pusat; dan saling berbagi praktik cerdas dalam bidang energi terbarukan.

Syahrial Loetan, Senior Advisor MCA-Indonesia dalam sambutannya juga mengisahkan sejarah terpilihnya Indonesia sebagai salah satu penerima hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC). Menurutnya. Menurutnya, awal pengajuan untuk hibah compact dari MCC sudah dimulai sejak 2005 dan setelah melalui proses panjang, Indonesia akhirnya terpilih sebagai salah satu penerima hibah karena dianggap memenuhi beberapa indikator penting. Karenanya, Syahrial Loetan berharap semua pihak mau dan mampu bekerja sama untuk membuktikan kelayakan Indonesia menerima hibah tersebut.

Acara hari itu dibuka oleh Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA., Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika - Kedeputian Sarana dan Prasarana BAPPENAS. Dalam sambutannya, Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA memberikan beberapa data dan fakta tentang energi di Indonesia termasuk rasio elektrifikasi yang masih berada di angka 87,5% dari target 96,6% di tahun 2009.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah Indonesia dianggap sulit untuk memenuhinya jika harus bekerja sendirian. Karenanya peran sektor swasta dan BUMN diharap bisa membantu pemerintah memenuhi target. MCA-Indonesia dianggap sebagai salah satu pihak yang bisa membantu kerja-kerja pemerintah di bidang

Indonesia menyediakan energi buat negara lain, tapi masih belum bisa memenuhi ketersediaan energi di dalam negeri.

pemenuhan kebutuhan energi. Sektor energi baru dan terbarukan (EBT) diharapkan bisa meningkat dengan pesat mengingat banyaknya sumber daya alam non fosil yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pemerintah, menurut Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA. sudah menyiapkan beberapa langkah dan kebijakan untuk mendukung tumbuh kembangnya EBT di Indonesia.

Paparan tentang kebutuhan dan ketersediaan energi di dalam negeri lebih lanjut dibawakan oleh Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc., Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS. Menurutnya, kebutuhan energi Indonesia memang terus meningkat dengan pesat sementara ketersediaan energi di dalam negeri terus menipis. Indonesia memang bukan produsen energi terbesar, tapi termasuk exportir terbesar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menyediakan energi buat negara lain, tapi masih belum bisa memenuhi ketersediaan energi di dalam negeri.

Berdasarkan pada analisa itulah, pemerintah menurut Ir. Josaphat Rizal Primana, Msc. terus mengupayakan pertumbuhan energi baru dan terbarukan termasuk menciptakan dukungandukungan dari segi regulasi. Regulasi ini diharapkan bisa mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan pembangunan energi baru dan terbarukan.

Salah satu pertanyaan penting dari peserta adalah tentang bagaimana diskusi-diskusi seperti ini benar-benar bisa diterjemahkan menjadi praktik di lapangan. Tri Mumpuni dari Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) mempertanyakan efektivitas dari diskusi semacam ini karena menurutnya diskusi seperti ini sudah sering dilakukan. Atas pertanyaan ini, Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc. mengakui masih lemahnya koordinasi antar pihak pemerintah, termasuk dengan pihak DPR.

Acara hari itu juga dirangkaian dengan dua talkshow. Talkshow pertama adalah mengambil tema: Antara Kebijakan dan Implementasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat. Sebagai pembicara dihadirkan narasumber Victoria Boru Simanungkalit dari Kementerian Koperasi, Tri Mumpuni dari Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) dan Verania Andria -Associate Director of Communitybased RE, Community-based RE Project, GP Project, MCA-Indonesia.

Sementara itu talkshow kedua dihadirkan dengan tema; Pemanfaatan dan Pengelolaan energi Terbarukan Berbasis Masyarakat, Siapkah Desa? Narasumber yang tampil adalah; Dr. Suprapedi, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Desa, Ir. Maritje Hutapea, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM, Drs. Yusmar, MSi., Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rokan Hulu, Riau dan Umbu Hinggu Panjanji, Ketua Koperasi Jasa Peduli Kasih Kamanggih, Sumba

Drs. Yusmar, MSi. dan Umbu Hinggu Panjanji sengaja dihadirkan karena keduanya punya pengalaman mengelola energi baru dan terbarukan di daerah asalnya masing-masing. Drs. Yusmas, MSi. mewakili pengelola Pembangkit Listrik Biogas (PLTBg) dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit di Rokan Hulu, Riau dan Umbu Hinggu Panjanji dengan koperasinya berhasil mengelola Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) di Sumba Timur,

Green News Café

Nusa Tenggara Timur.

Timur.

Di waktu yang bersamaan, digelar juga Green News Café yang mengundang para jurnalis dan blogger yang konsen pada isu lingkungan hidup. Acara ini digelar di ruangan Jawa Hotel Borobudur Jakartadan dihadiri oleh belasan





jurnalis dari berbagai media cetak dan digital.

Acara yang dimulai pukul 10:30 WIB ini dibuka oleh Victoria Ngantung dari BaKTI. Dalam sambutannya Victoria Ngantung memaparkan tujuan dari Green News Café yaitu sebagai ajang diskusi dan saling bertukar pengetahuan tentang program Kemakmuran Hijau dari MCA-Indonesia serta isu-isu energi lainnya.

Menurut Victoria Ngantung, acara hari itu juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana posisi energi baru dan terbarukan di Indonesia saat ini. Karenanya dia mengharapkan acara tersebut menjadi ajang berbagi tentang isu-isu rendah karbon antara para wartawan dan blogger yang hadir dengan dua narasumber.

Narasumber yang dimaksud adalah Ichsan dari MCA-Indonesia yang bercerita panjang lebar tentang Window 3 dari dana hibah MCA-Indonesia. Dalam paparannya, Ichsan





menjelaskan tentang alur pendanaan, studi kelayakan hingga penetapan penerima hibah Window 3 MCA-Indonesia. Dalam pemaparannya juga, Ichsan menjelaskan beberapa tantangan yang sempat dihadapi oleh komunitas yang mengajukan proposal. Salah satunya adalah ketidaksiapan mereka untuk meneruskan proyek energi baru dan terbarukan yang sudah selesai. Selain masyarakat yang tidak siap, ada juga beberapa proyek yang sudah bermasalah di sistem pengelolaan sejak masih di tangan kontraktor. Kontraktor hanya mengerjakan proyek tanpa menyiapkan pemeliharaan sebelum diserahterimakan kepada masyarakat.

Tampil sebagai narasumber berikutnya adalah Fabby Tumiwa dari Institute For Essential Service Reform (IESR). Fabby Tumiwa membawakan materi tentang pengelolaan energi terbarukan berbasis masyakarat.

"Pengelolaan energi baru dan tebarukan berbasis masyakarat dalam skala kecil menengah memberi kesempatan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat," kata Fabby Tumiwa. Masyarakat menurut Fabby Tumiwa bisa dilibatkan secara penuh dalam pembangunan energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangunan hingga pengelolaan.

Selain itu, Fabby Tumiwa juga menilai pengadaan energi baru terbarukan berbasis masyarakat juga bisa memaksimalkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyakarat lokal. Keberadaan listrik di suatu kawasan bukan hanya mendatangkan penerangan saja tapi juga bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan potensipotensi lain yang bersifat ekonomi kerakvatan.

Antusiasme para peserta Green News Café sangat besar, terbukti dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang terjadi. Selain pertanyaan yang bersifat teknis, peserta juga ada yang mempertanyakan dampak negatif dari mengalirnya listrik ke suatu

daerah. Misalnya, listrik dianggap bisa mendongkrak konsumerisme dari warga yang sebelumnya tidak mengenal listrik. Untuk pertanyaan itu, Fabby Tumiwa menjawab bahwa mau tidak mau itu akan jadi salah satu efek dari hadirnya listrik. Meski begitu diharapkan dampak positif dari kehadiran listrik justru lebih besar dari dampak negatifnya.

Acara Green News Cafe berakhir molor dari jadwal, salah satu alasannya karena para peserta masih terus mengajukan pertanyaan khususnya kepada Fabby Tumiwa meski acara telah ditutup. Ini menunjukkan tingginya rasa ingin tahu dari para jurnalis tentang perkembangan dan tantangan dari energi baru dan terbarukan di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



Menuju Layanan Kesejahteraan Anak yang Holistik dan **Komprehensif**

Oleh Mugniar Marakarma



asih ingat kasus seorang oknum dosen di Cibubur, yang bersama istrinya menelantarkan kelima anaknya pada tahun 2015 lalu? Sepasang suami istri itu akhirnya dijerat dengan pasal 76 (b) dan pasal 77 (b) Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Mau tahu yang lebih ekstrem lagi? Ada orang tua yang menjadikan anak perempuannya sebagai pekerja seks komersial! Sebagian dari kita pasti merasa aneh dan ingin merutuki yang demikian.

Karena sudah seharusnyalah orang tua sendiri yang paling berperan melindungi anak, bukan menelantarkan atau menjualnya. Namun, begitulah kenyataannya. Hal-hal yang ekstrem itu bisa saja terjadi. Bahkan profesi dan pendidikan akhir pelaku yang sangat terhormat di tengah masyarakat sekali pun tidak mampu menghalanginya dari perbuatan tercela.

Coba browsing kata kunci "orang tua aniaya anak" atau "ibu aniaya anak", Anda akan terkejut sendiri melihat hasil-hasil yang ditampilkan. Ada bayi yang dibanting, ibu gergaji anak, anak yang meninggal setelah disiksa, dan lain-lain. Topik terkait penganiayaan orang tua terhadap anak saja mudah ditemukan, apalagi yang terkait penganiayaan baik fisik maupun seksual, yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak di bawah umur. Kalau dalam lingkungan terdalam (keluarga inti) saja, tak selalu situasi dan kondisinya aman sentosa dan terkendali, terlebih lagi di dalam lingkungan masyarakat. Dunia luar rumah bak hutan belantara yang siap menerkam dan memenjarakan anak-anak kita.

Anak-anak memang rentan mendapatkan kekerasan, karena kepolosan, kelabilan, dan persepsinya tentang sesuatu yang masih dangkal. Bahkan pada beberapa kasus, anak-anak justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lain sehingga membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum. Dalam keadaan sebagai pelaku maupun korban, anak-anak kemudian rentan mengalami halhal yang tidak semestinya. Hak-haknya diabaikan. Bukannya bisa kembali menikmati dunia bermain, masalah-masalah baru justru bermunculan. Apa itu? Stigma negatif yang terus melekat, putus sekolah, atau kembali berhadapan dengan hukum contohnya.

Anak, sebagai generasi penerus bangsa harus diperhatikan haknya secara khusus. Karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang rentan, tergantung, dan berkembang. Butuh kerja sama semua pihak mengupayakannya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23/2002 dan Konvensi Hak Anak. Sekali lagi, semua pihak, di luar orang tua dan keluarga dekat.

Meningkatkan Peran Lintas Sektoral dan Integratif

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, karena menyadari pentingnya meningkatkan peran lintas sektoral, BaKTI bekerja sama dengan Unicef mengadakan Workshop Penyusunan SOP Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Makassar dan Gowa.



Workshop ini yang diselenggarakan pada tanggal 27 - 28 September 2016 ini diikuti oleh 31 orang (11 laki-laki, 20 orang perempuan) wakil dari instansi-instansi pemerintah dan LSM-LSM yang terkait dengan perlindungan anak. Para peserta berasal dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Hal menarik yang disampaikan oleh Ibu Amelia Tristiana (Ibu Tria) - Child Protection Specialist Unicef pada awal workshop ini adalah: di Sulawesi Selatan, kasus diversi meningkat. Dari 53 anak pada tahun 2014 menjadi 314 anak di tahun 2015. Pada periode trimester pertama tahun 2016, rata-rata anak yang melewati diversi adalah 26 anak per bulan. Kota Makassar sendiri mencatat 41% dari kasus diversi Sulawesi Selatan yang dilayani melalui Kantor Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kota Makassar. Sangat disayangkan ketika anak kembali ke rumah maka tidak ada mekanisme pemantauan dan pemberian layanan bagi anak anak tersebut sehingga mereka rentan berhadapan dengan hukum kembali.

Anak yang terlibat kasus begal, misalnya. Stigma buruk dengan mudah melekat padanya. Kembali kepada keluarga, belum tentu juga berarti mengembalikan kehidupannya kepada keadaan yang lebih baik. Belum tentu ia lantas melanjutkan sekolah dan tak bertemu dengan kawan-kawan yang memberikan pengaruh buruk padanya.

Di sisi lain, diversi ternyata tidak selalu menyelesaikan masalah. Mengapa? Aktivis LBH Jakarta, Tommy Albert Tobing pernah mengatakan mengenai banyaknya aparat kepolisian yang menangani diversi di lapangan

Workshop Penyusunan SOP Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Makassar dan Gowa

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Arafah

justru kurang paham dengan arti diversi yang sebenarnya. Menurutnya, diversi dimaknai secara sederhana oleh polisi yakni dengan hanya mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara.

Padahal diversi bukan hanya bertemu dan berbicara. Diversi, sejatinya adalah suatu upaya perlindungan anak yang perlu mendapatkan perhatian besar. Dengan diadopsinya Undang Undang Peradilan Pidana Anak no 11 tahun 2012, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam mereformasi sistem peradilan anak dengan melindungi anak lebih baik. Undangundang ini berfokus pada diversi dan keadilan restoratif, dengan menyatakan pemenjaraan anak adalah pilihan terakhir.

Ibu Tria menyampaikan apresiasinya kepada unit-unit dalam struktur instansi pemerintah dan LSM-LSM yang memberikan layanan kesejahteraan anak. Seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diupayakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang memberikan layanan bagi anak dan perempuan korban kekerasan, RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak yang diupayakan Dinas Sosial), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) seperti PSBR Maros dan PSMP Toddopuli, dan berbagai LKSA. Juga kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang memberikan bantuan hukum, medis, dan psikososial, seperti LBHP2i, LBH Apik, YLBH, LPA, Forum Pemerhati Masalah Perempuan, Yasmib, LPA Gowa, Pabatta Umi, Saribattang, dan sebagainya.

"Namun semua upaya ini tidak akan bertaring tajam, memiliki cakar dan tanduk jika bekerja secara terpisah-pisah. Oleh karena itu diperlukan layanan kesejahteraan anak yang holistik dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen pelayanan yang sudah ada, tidak saja untuk penanganan korban namun lebih penting lagi untuk upaya pencegahan, utamanya mendeteksi anak dan keluarga yang memerlukan pelayanan," Ibu Tria menekankan pentingnya upaya mempertemukan para peserta dalam dua hari ini. Tentunya kegiatan ini bertujuan agar para peserta bisa menyusun draft SOP (standard of procedure) pelaksanaan dan mekanisme pelayanan bagi Pusat Layanan Perlindungan Sosial Anak Intergratif (PSAI).

Kerja Sekarang untuk Peradaban

Bertindak sebagai nara sumber/fasilitator pada workshop ini adalah Bapak Akbar Halim, peneliti PUSKAPA UI (Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia). Melalui sebuah cerita, Pak Akbar menyampaikan pesan mengapa kita harus membangun sistem perlindungan anak yang tepat. Banyak tindakan cepat yang diambil pada kasus penganiayaan anak tetapi hasilnya fatal. Belum lagi harus berhadapan dengan orang-orang yang "merasa sudah berpengalaman menjadi anak sehingga tahu bagaimana harus memperlakukan anak". Untuk persepsi yang salah, bahaya akibatnya jika "merasa paham" tentang anak. Maka, semua peserta harus memiliki persepsi yang sama tentang anak.

Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, patut mengupayakan pemenuhan hak anak karena anak membutuhkannya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Hak anak yang harus diperhatikan adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Di samping itu, ada hal-hal di mana anak membutuhkan perlindungan khusus, yaitu ketika: anak berhadapan dengan hukum, dalam situasi darurat, dalam konflik bersenjata, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, drugabuse, trafficking, dan anak kelompok minoritas dan komunitas adat terpencil.

"Bapak Ibu bukan jadi orang tua masingmasing tapi jadi agen Makassar dan Gowa agar nanti, yang usianya di bawah delapan belas tahun, dua puluh tahun lagi, minimal tidak menjadi maling, masuk Lapas, KPK, atau jadi beban masyarakat. Jadi, fokus kita ketika berbicara tentang anak bukanlah anak kita tetapi peradaban," tegas Pak Akbar.

Faktor risiko dan pelindung harus menjadi bahan pertimbangan juga. Dalam diri anak, keluarga, dan lingkungan sekitar terdapat kedua faktor ini. Contoh faktor risiko: tidak paham tentang situasi-situasi ancaman (pada anak), konflik rumah tangga (pada keluarga), dan warga tidak saling kenal/peduli (lingkungan sekitar). Contoh faktor pelindung: komunikatif (pada diri anak), rumah cukup ruang untuk privasi (pada keluarga), dan interaksi positif antar warga dalam pengawasan anak (pada lingkungan sekitar). Jika secara akumulatif faktor pelindung jauh lebih kecil daripada faktor risiko, maka anak rentan menjadi korban.

Ada banyak layanan terhadap anak yang tersedia. Dengan duduk bersama, menyusun sistem terintegrasi diharapkan kesalahan pelayanan yang terjadi selama ini bisa dikurangi. Diharapkan hal-hal yang banyak terjadi selama ini, seperti: terlambat ditangani, parsial, tidak tuntas, menambah derita, inkonsisten, inefisien, dan jumlah pelayanan diatur kuota tidak terjadi

Pak Akbar dan Bu Tria dengan dibantu BaKTI, menjelaskan dan mendampingi para peserta workshop dalam penyusunan draft SOP. Selanjutnya, dalam dua hari, para peserta dalam kelompok Makassar dan Gowa bekerja sama lintas sektoral menyusun draft yang dibutuhkan masing-masing wilayah. Ini baru langkah awal. Rencananya masih akan ada pembicaraan/ pertemuan selanjutnya untuk merampungkan misi bersama ini. Diharapkan, selanjutnya terbentuk SOP Pelayanan Kesejahteraan Anak Terintegratif di Makassar dan Gowa. Mari kita do'akan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah seorang ibu rumah tangga di Makassar yang juga sangat aktif ngeblog. Blog pribadinya bisa dilihat di http://mugniar.com

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA

GRFFN KNOWI FDGF ACTIVITY - GRFFN PROSPFRITY PROJECT

Mengukur **Efektivitas Aktivitas Pembuatan Video Animasi** dan Komik "Energi Baru Terbarukan" dari **Proyek MCA-I BaKTI**

Oleh Ricky Djodjobo

ari berbagai kegiatan yang dirancang dan diselenggarakan untuk tujuan penyebaran informasi dan berbagi pengetahuan mengenai Pembangunan Rendah Karbon, dalam Proyek Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau MCA Indonesia yang dilaksanakan Yayasan BaKTI, salah satunya ditargetkan khusus bagi siswa-siswa sekolah dasar. Anak-anak sebagai pewaris dan penentu masa depan pembangunan bangsa dinilai perlu untuk mulai menyadari isu-isu global secara dini, sebagaimana halnya juga stake holder pembangunan lainnya. Namun, usia muda dan intelektualitas yang baru mulai diasah memang menjadi tantangan tersendiri dalam memilih dan mendesain materi maupun metode penyampaian informasi tersebut, agar menarik dan mudah dicerna oleh mereka.

Pemilihan media film animasi dan komik sebagai media untuk mengkomunikasikan isu pembangunan rendah karbon terhadap anakanak didasari atas pertimbangan bahwa film animasi dan buku komik memiliki kekuatan dalam hal daya tarik secara visual bagi anak-anak pada umumnya. Akan tetapi memilih jenis media saja tidak bisa menjamin bahwa pesan/informasi dan pengetahuan akan efektif tersampaikan. Pengolahan dari materi yang menjadi isi dari media tersebut, tentu juga berperan penting. Untuk memastikan bahwa pengolahan materi, penyajian dan pemilihan media-nya sudah efektif, tentunya melihat langsung hasilnya akan lebih bermakna daripada mengasumsikan.

Tim MCA-BaKTI merencanakan untuk mengembangkan 3 edisi dari video animasi dan buku komik yang terkait isu pembangunan rendah karbon, dan untuk edisi yang pertama ini, tema yang diangkat adalah "Energi Baru Terbarukan." Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana cara tim MCA-BaKTI memandang efektivitas dari film animasi dan buku komik edisi pertama yang dikembangkan oleh tim MCA-BaKTI, yang diputar dan dibagikan kepada para siswa dalam event Pemutaran Video Animasi dan Sosialisasi Buku Komik, di sembilan kabupaten yang menjadi wilayah target Aktivitas Pengetahuan Hijau dari Proyek Kemakmuran Hijau-MCA Indonesia. Dengan mengukur efektivitasnya, keberhasilan kegiatan (activity) dari proyek dan event-nya tidak hanya terukur dari keluaran berupa berapa film dan berapa komik yang dibuat serta berapa banyak yang didistribusikan, tetapi juga bisa lebih jauh melihat bagaimana pencapaian hasil dari kegiatan tersebut.

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan dan Peserta

Kegiatan pemutaran video animasi dan pembagian buku komik dilakukan di 9 lokasi (lihat tabel).

Secara umum sekolah-sekolah yang berpartisipasi sebagai target dari kegiatan, cukup mewakili keberagaman kondisi sekolah dan situasi lokasi sekolah yang ada di Indonesia. Sebagian sekolah berada di daerah kota, dengan berbagai fasilitas pendukung kota ukuran sedang

yang cukup memadai, sebagian lagi berada di wilayah yang cukup sulit dari segi akses ke lokasi dan fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas. Keberagaman ini diharapkan bisa memberi gambaran mengenai pengaruh dari produk video dan buku komik pada anak-anak dari kondisi lingkungan yang beragam.

Beberapa variasi dan perbedaan peserta dari tiap lokasi yang terkait dengan kondisi setempat antara lain:

- Di provinsi NTT, rata-rata sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan bukanlah sekolah besar, bahkan di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, sekolah yang berpartisipasi tergolong minim fasilitas dan memiliki akses yang sulit. Pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah, dan pesertanya terbatas pada siswa-siswa di sekolah tersebut. Oleh karena sekolahnya tergolong kecil maka semua siswa kelas 4,5 dan 6 dikerahkan sebagai peserta.
- Di provinsi NTB, oleh karena dukungan yang sangat kuat dari Dinas terkait dan pemerintah setempat, maka pelaksanaannya dilakukan di fasilitas pemerintah dan melibatkan beberapa sekolah sekaligus di satu lokasi. Oleh karenanya pesertanya lebih selektif dari siswa-siswa yang ditunjuk saja, bukan semua siswa kelas 4,5 dan 6 dari tiap sekolah.
- Di provinsi Sulawesi Barat, kegiatan

KEGIATAN PEMUTARAN VIDEO ANIMASI DAN PEMBAGIAN BUKU KOMIK DILAKUKAN DI 9 LOKASI, SEBAGAIMANA DALAM TABEL BERIKUT.

No	Lokasi Kegiatan	Sekolah Peserta	Kabupaten	Provinsi	
1 2 3 4	SD Praimarada SD Loku Lalang SDN Tabuludara SD Kadekap	SD Praimarada SD Loku Lalang SDN Tabuludara SD Kadekap	Sumba Timur Sumba Tengah Sumba Barat Sumba Barat Daya	NTT NTT NTT NTT	
5	SD Inpres Rimuku SDN 1, Mamasa	SD Inpres Rimuku SDN 1, Mamasa	Mamuju Mamasa	Sulawesi Barat Sulawesi Barat	
7	Gedung Wanta Selong	SDN 1 Pancor SDN 2 Pancor SDN 3 Pancor SDN 3 Selong	Lombok Timur	NTB	
8	Dinas Pendidikan dan Olahraga, Lombok Tengah	SDN 1 Tengari SDN 2 Tengari SDN 3 Praya SDN 4 Praya	Lombok Tengah	NTB	
9	Kantor Bupati Lombok Utara	SDN 1 Tanjung SDN 2 Tanjung	Lombok Utara	NTB	

dilaksanakan di sekolah-sekolah dan pesertanya adalah siswa-siswa sekolah yang bersangkutan. Sekolah-sekolah yang berpartisipasi adalah sekolah-sekolah yang tergolong "terbaik" di masing-masing ibukota kabupaten. Sebagai sekolah yang tergolong "besar" di kabupatennya maka jumlah siswa pun cukup besar. Oleh karenanya siswa-siswa yang berpartisipasi hanyalah sebagian saja dari siswa kelas 4, 5, dan 6 yang ada, menurut seleksi dari sekolah masing-masing.

Proses Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di masing-masing lokasi, pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar, yaitu pemutaran video dan kegiatan membaca komik oleh anak-anak peserta. Dua kegiatan tersebut diselingi dengan berbagai variasi permainan dan kuis, yang dipandu oleh para guru setempat dan host acara yang disiapkan BaKTI.

Untuk mengukur penyerapan informasi para siswa dari menonton video animasi dan membaca komik tersebut, disiapkan lembaran pre dan post test sederhana yang digunakan sebelum dan sesudah kegiatan. Lembaran pre dan post test terdiri dari 5 pertanyaan terkait konsep dasar dari isu yang diperkenalkan melalui video dan komik, yaitu Energi Terbarukan. Setiap pertanyaan memungkinkan siswa untuk memilih yang mana saja dari beberapa pilihan, yang merupakan pernyataan yang benar. Ke-lima pertanyaan tersebut pada dasarnya mengukur:

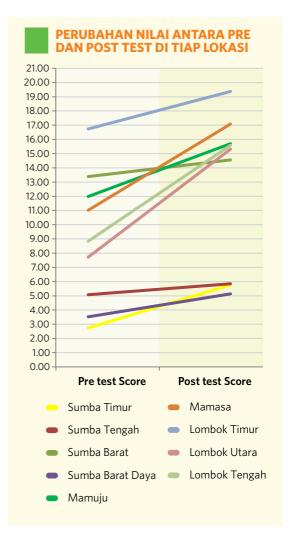
- 1. Kemampuan siswa memahami apa itu energi itu,
- 2. Kemampuan siswa membedakan sumber energi terbarukan dari sumber-sumber energi fosil,
- 3. Kemampuan siswa mengenali sifat dan keuntungan dari sumber energi terbarukan dibanding sumber energi dari fosil.

Hasil Kegiatan

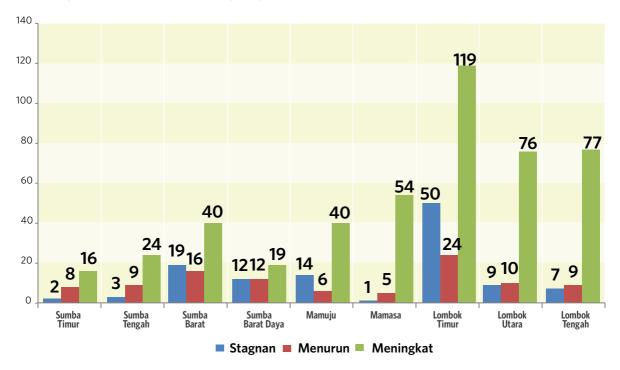
Hasil kegiatan yang secara khusus melihat perubahan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isu yang diinformasikan lewat video dan komik, tergambar dari dua grafik berikut ini, yang menampilkan gambaran perubahan nilai (rata-rata) antara sebelum (pre) kegiatan dengan sesudah (post) kegiatan, dan perbandingan antara jumlah siswa yang mengalami peningkatan nilai dengan yang tidak mengalami peningkatan nilai ataupun yang malah menurun nilainya, di tiap lokasi kegiatan.

Beberapa hal yang tergambar dari grafik tersebut adalah:

- 1. Di semua lokasi kegiatan terjadi peningkatan nilai rata-rata antara pre dan post test. Peningkatannya nilai rata-ratanya bervariasi dari yang kecil, misalnya di Sumba Tengah (0,77 poin) hingga yang besar, seperti di Lombok Utara (7,6 poin).
- 2. Di semua lokasi kegiatan siswa yang mengalami peningkatan nilai jauh lebih banyak dibanding dengan yang tidak mengalami peningkatan nilai atau penurunan nilai, sekalipun proporsinya bervariasi di tiap lokasi. Proporsi terkecil di terlihat Kabupaten Sumba Barat sebesar 44 % (dibanding yang stagnan 28% ataupun yang menurun 28%), hingga yang terbesar 90 % di



PERBANDINGAN JUMLAH KASUS PERUBAHAN NILAI DI TIAP LOKASI



kabupaten Mamasa (dibanding yang stagnan 2% dan yang menurun 8%).

Kedua data di atas pada dasarnya cukup memberikan gambaran tentang hasil dari pengukuran kegiatan tersebut. Perbedaan intensitas dan porsinya dapat dimaklumi sebagai variasi dari kondisi-kondisi yang berbeda di setiap lokasi. Misalnya Intensitas peningkatan nilai rata-rata yang terlihat ekstrim terjadi di Lombok Utara, lombok Tengah, Mamasa, Mamuju dan Lombok Timur. Sementara itu, intensitas peningkatan nilai rata-rata yang lebih rendah terjadi di semua kabupaten di Provinsi NTT.

Hal ini sangat mungkin terkait dengan beberapa kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:

Siswa-siswa peserta di NTB dan Sulbar cenderung merupakan siswa-siswa yang terseleksi dari berbagai sekolah atau dari banyaknya siswa di sekolah besar. Sedangkan peserta di NTT cenderung tidak "terseleksi".

Siswa-siswa peserta di provinsi NTB dan Sulbar cenderung berasal dari sekolahsekolah yang lebih "maju" dengan fasilitas penunjang belajar di sekolah dan di rumah yang lebih baik, dibanding dengan siswa dari sekolah-sekolah di NTT, sehingga secara umum berpotensi memiliki kemampuan yang lebih baik (misalnya dalam hal membaca dan memahami bacaan).

Tentunya masih ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi tiap individu siswa dalam menyerap informasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Namun setelah diuji-cobakan pada kondisi-kondisi umum yang beragam, gambaran besar dari kegiatan ini tetap menunjukkan adanya perubahan ke arah positif dalam hal peningkatan pengetahuan tentang isu terkait, setelah kegiatan menonton film animasi dan membaca komiknya. Oleh karenanya pembuatan Film Animasi dan Komik mengenai "Energi Baru Terbarukan" ini, dinilai berhasil memenuhi tujuan pembuatannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

HASIL TANGAN KOTOR

Oleh **W.I.M. POLI**

amanya Josephine Sokoy, seorang perempuan pengusaha dari daerah Danau Sentani, Papua. Ia berhasil memberdayakan diri dan orang lain di sekitarnya. Awal usahanya dimulai pada tahun 1996 dengan dana sebesar Rp. 250.000 yang diperolehnya dari bantuan seorang anggota keluarga di Belanda. Dana awal ini menghasilkan 38 bungkus tepung sagu yang dikemas dengan nama *Sentani Meer* (Belanda: Danau Sentani). Berawal dari tepung sagu dan kue sagu, usahanya merambat ke usaha batik, pembibitan kakao, serta pengadaan komputer dan peralatan kantor untuk dinas-dinas pemerintah.

Dari usahanya ini ia menciptakan lapangan kerja untuk beberapa perempuan, dan sejumlah pemuda yang membantunya sambil belajar. Ada yang sampai menjadi lulusan S2 di Makassar. Apa rahasianya?

Dari percakapan penulis dengan alumnus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1975 ini, dapat diidentifikasi tiga sumber kekuatan dari masa lalunya.

Pertama, pengalaman masa kecil di sekitar meja makan. Ketika berkumpul dengan saudara-saudaranya di sekitar meja makan, ayahnya, yang adalah seorang petani, sering mengatakan kepada anak-anaknya: Kamu harus hidup dengan masukkan sepuluh jarimu ke dalam tanah.

Josephine Sokoy, didampingi suaminya (kiri), diwawancarai penulis di rumahnya, Sentani, Papua, 2008. Foto Dok. Penulis

Kalimat itu bermakna, anak-anaknya harus bekerja dengan kekuatan sendiri. Tangan yang kotor karena bertani akan menghasilkan makanan di meja makan. Nasehat ini ditimpali oleh nasehat ibunya, yang mengatakan: Kamu harus

bekerja dengan peluh yang bercucuran. Sebuah nasihat yang mengajarkan anak-anaknya untuk terus bekerja tanpa kenal lelah.

Kedua, nilai kemandirian itu dilengkapi selanjutnya dengan hidup yang berdisiplin. Sumber kedisiplinan hidupnya diperoleh dari pengalaman kerja dengan sebuah keluarga Kanada selama 38 tahun. Keluarga Kanada ini tidak mempunyai anak, dan karena itu memperlakukan Josephine sebagai anak yang harus dibentuk untuk menjalani hidup yang berdisiplin. Kerja tepat waktu dengan jujur adalah prinsip hidup yang membuahkan hasil kerja yang maksimal.

Ketiga, kemandirian dan hidup berdisiplin itu membuahkan hasil kerja yang harus digunakan secara bertanggung-jawab. Dari keluarga Kanada di atas, ia menerima petuah bahwa semua hasil kerjanya harus diserahkan 10% untuk Tuhan. Ini adalah perwujudan ajaran agama yang dianutnya sedari masa kecil.

Josephine berkata, "Saya setia memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu perpuluhan. Itu kunci dalam hidup saya. Dengan penerimaan kecil atau besar dalam satu hari, saya duduk di meja dan angkat tangan, dan mengatakan: "Tuhan, ini dari hasil saya hari ini, dan inilah Tuhan punya". Sebelum matahari terbenam saya tidak boleh mencuri hak milik Tuhan. Ini orang Kanada yang ajarkan kepada saya. Ternyata betul. Apa yang saya inginkan, saya berdoa, dan Tuhan selalu menjawab."

Bukti bahwa Tuhan selalu menjawab permohonannya dilukiskannya dengan pengalamannya meminta kredit kepada bank untuk membayar kewajibannya dalam waktu



yang sempit.

"Waktu itu saya berhutang Rp 100 juta kepada pabrik Batik Keris di Solo. Kiriman batik kepada saya dari Solo sudah tiba sebanyak 28 koli, dan saya harus membayarnya dalam waktu tiga hari saja. Saya berdoa dan minta Tuhan menjawab saya. Setelahnya, saya pergi ke bank untuk meminta kredit. Di sana saya duduk, menunggu. Lalu datang pimpinan bank – seorang ibu - dan bertanya kepada saya 'Selamat pagi, ibu. Apa yang bisa saya bantu?'. Saya bilang, saya membutuhkan kredit Rp. 100 juta. Ibu pimpinan bak itu bilang, masukkan saja surat permohonan kredit. Saya lalu naik ojek, pulang untuk mengambil Surat Izin Usaha untuk dilampirkan pada surat permohonan kredit. Surat dimasukkan. Besoknya keluar jawabannya. Permohonan kredit saya diterima. Saya segera mengtransfer uang ke Solo. Kemudian sava berlutut, berdoa, mengatakan: 'Tuhan, Engkau luar biasa bagiku'," kisah Josephine.

Kisah Josphine ini memberi pelajaran bagi kita. Pemberdayaan diri seseorang dimulai dengan hidup berkayikan dan disiplin. Keyakinan kuat dan disiplin ketat ini bisa dibentuk sejak usia dini dan ditanamkan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak saling kenal.

Modal awal itu bisa membuat kita menangkap peluang-peluang baru untuk peningkatan kehidupan yang lebih bermakna. Bermakna baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

ADVOKASI Kebijakan Publik yang Feminis

BAGIAN 2



Di Bagian pertama edisi sebelumnya dipaparkan tentang kondisi umum bagaimana kondisi umum di Indonesia yang masih menerapkan diskriminasi pada perempuan. Bagian kedua ini membahas tentang hasil riset Anggota Parlemen Perempuan (APP) dan kapasitasnya.

Oleh

M. GHUFRAN H. KORDI K. & LUSIA PALULUNGAN

umlah APP di lokasi riset/lokasi Program MAMPU sangat rendah. Jumlah APP periode 2009-2014 di tiga lokasi riset berturut-turut sebagai berikut: DPRD Kabupaten Bone terdapat 9 perempuan (20%)

dari 45 anggota DPRD; DPRD Kota Mataram 3 perempuan (8%) dari 35 anggota DPRD, sedangkan DPRD Provinsi Maluku terdapat 14 perempuan (31,1%) dari 45 anggota DPRD. Pada periode tersebut hanya terdapat 1 perempuan di DPRD Kota Ambon.

Jumlah perempuan di sembilan DPRD yang merupakan Program MAMPU-BaKTI disajikan pada Tabel 1. Hanya dua DPRD, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Belu yang anggota perempuannya mencapai 2 digit, yang persentasennya mencapai di atas 30 %.



HANYA 16,5 % APP YANG **BERGELAR** SARJANA DIRANDINGKAN APL YANG MENCAPAI **83.5** %

Dari sisi tingkat pendidikan, hanya 16,5 % APP yang bergelar sarjana dibandingkan APL yang mencapai 83,5 %. Bahkan anggota parlemen yang menamatkan pendidikan hingga pasca sarjana semuanya adalah laki-laki, meskipun ada beberapa APP dalam tahap menempuh pendidikan pasca sarjana. Ini mengindikasikan rendahnya tingkat pendidikan APP di lokasi Program MAMPU-BaKTI.



TIDAK SEMUA APP MENGETAHUI/ **MEMAHAMI FUNGSI LEGISLASI.**

Sementara kapasitas APP dilihat dari tugas pokok dan fungsi anggota parlemen, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, baik pada riset pertama maupun riset kedua, menunjukkan bahwa APP belum maksimal dalam memahami dan menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan

TABEL 1. JUMLAH APP DI LOKASI PROGRAM MAMPU-BAKTI

Kabupaten/ Kota	JUMLAH ANGGOTA DPRD	Jumlah App	PERSENTASE (%)
Bone (Sul-Sel)	45	6	13,3
Parepare (Sul-Sel)	25	3	12,0
Maros (Sul-Sel)	35	7	20,0
Tana Toraja (Sul-Sel)	30	6	20,0
Kendari (Sul-Teng)	35	13	34,2
Belu (NTT)	30	11	37,1
Mataram (NTB)	40	5	12,5
Lombok Timur (NTB)	50	2	4,0
Ambon (Maluku)	35	4	11,4
Total	325	57	17,05

fungsi legislasi setidaknya terdapat 12 point penting yang harus diketahui, disikapi, dan ditindaklanjuti APP, menujukkan bahwa, tidak semua APP mengetahui/memahami fungsi legislasi.

Untuk fungsi anggaran, beberapa APP yang merupakan muka lama (2009-2014) telah mengetahui komponen-komponen fungsi anggaran, tetapi belum menguasainya secara optimal. Sementara secara umum, APP yang baru masuk di DPRD pasca pileg (pemilu legislatif) 2014 umumnya tidak memahami dan mengetahui fungsi anggaran.

Sementara fungsi pengawasan, secara umum APP (dan APL) belum melaksanakan secara maksimal. Ini karena keterbatasan oleh sebagian besar APP itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dari 12 point penting yang harus diketahui dan dikuasai APP untuk menjalankan pengawasan, hanya APP yang telah dua kali menjadi anggota DPRD yang mengetahui dan memahami fungsi pengawasan.

Yang lainnya adalah mengukur kapasitas APP terkait penguasaan tema Program MAMPU. Faktor ini dijadikan ukuran karena lima tema MAMPU merupakan masalah yang berhubungan dengan perempuan dan kemiskinan. Kelima tema MAMPU tersebut adalah: (1) perlindungan sosial; (2) akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja; (3) meningkatkan kondisi buruh migran; (4) kesehatan reproduksi; dan (5) mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Jika penguasaan APP terhadap lima tema MAMPU dikaitkan dengan fungsi legislasi, maka

APP mempunyai pemikiran dan harapan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, baik sebelumnya (2009-2014) maupun ke depan. APP sangat mendukung adanya legislasi, namun sebagian besar tidak percaya diri. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi APP melahirkan legislasi, sebagian APP telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, baik yang difasilitasi partai maupun pemerintah. Namun demikian, APP mengatakan bahwa yang telah diperoleh sangat kurang untuk mendukung tugas dan fungsi mereka.



KONTRIBUSI APP PADA PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN BERUPAYA **MENGALOKASIKAN** ANGGARAN PADA **BERBAGAI PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT** TEMA-TEMA MAMPU.

Selanjutnya, penguasaan lima tema MAMPU dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, maka APP pun telah berpikir untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran. Kontribusi APP pada pelaksanaan fungsi anggaran adalah berupaya untuk mengalokasikan anggaran, khususnya pada lembaga/dinas terkait agar berbagai program atau kegiatan yang terkait tema-tema MAMPU dapat dilaksanakan.



KONTRIBUSI APP PADA PELAKSANAAN **FUNGSI PENGAWASAN BERUPAYA UNTUK MENGAWASI SEGALA** PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DIRENCANAKAN **DAN MELIHAT KESESUAIANNYA DENGAN APBD**

Yang terakhir, penguasaan lima tema MAMPU dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, maka APP telah berpikir untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah. Kontribusi yang diberikan oleh APP pada pelaksanaan fungsi pengawasan adalah berupaya untuk mengawasi segala bentuk program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan daerah dan melihat kesesuaiannya dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Walaupun APP memiliki pemikiran untuk menjadikan tema MAMPU sebagai bagian yang perlu diperbaiki melalui tugas-tugas mereka di DPRD, namun mereka sulit menjelaskan visi dan strategi untuk mengimplementasikan tema-tema MAMPU dalam kerja-kerja parlemen.

Kapasitas APP juga bisa dilihat dari keterlibatannya dalam Alat Kelengkapan DPRD. Dengan jumlah APP yang sedikit tentu menyulitkan APP untuk mengisi pos-pos yang ada pada Alat Kelengkapan DPRD, yaitu: Badan Kehormatan (BK), Badan Legislasi (Baleg)/Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Baperda), Badan anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Bamus).

Keterwakilan APP pada Alat Kelengkapan DPRD secara kuantitatif cukup besar ditunjukkan di DPRD Kota Kendari dan kabupaten Belu (Tabel 2). Di DPRD Kendari, dua kelengkapan dewan, yaitu BK dan Bamus masing-masing mencatat keterwakilan APP sebesar 40,0% dan 47,1%, bahkan BK diketuai oleh APP. Dua alat kelangkapan lainnya menempatkan APP lebih dari 20%.

Keterwakilan APP yang juga signifikan ditujukan oleh DPRD Kabupaten Belu, terutama pada Bamus. Dari 11 anggota Bamus, 6 orang atau 54,5 % merupakan APP. Pada Alat Kelengkapan DPRD Belu terdapat dua kelengkapan dewan yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Banggar dan Bamus.



PROGRAM MAMPU MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN MISKIN MELALUI PENGUATAN PARLEMEN, KELOMPOK PEREMPUAN, DAN **MASYARAKAT**

Penguatan APP

Yayasan BaKTI mengembangkan Program MAMPU sejak tahun 2013 untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan

TABEL 2. DISTRIBUSI APP PADA ALAT KELENGKAPAN DPRD **DI LOKASI PROGRAM MAMPU-BAKTI**

KABUPATEN/		BK		LEG/ PERDA	BAN	GGAR	BA	MUS
KOTA	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р
Maros	4	1	8	3	14	5	17	2
Bone	4	1	9	2	19	1	18	1
Tana Toraja	2	2	9	1	17	2	12	4
Parepare	2	1	6	2	14	0	10	2
Mataram	4	1	8	1	20	2	12	2
Lombok Timur	4	1	17	0	26	1	10	0
Kendari	3	2	15	4	15	6	9	8
Belu	2	1	5	3	11	3	5	6
Ambon	3	1	12	0	20	2	17	1
Jumlah	28	11	89	16	156	22	110	26
Persentase	71,8	28,2	84,8	15,2	87,6	12,4	80,9	19,1

Sumber: Laporan Baseline Survey Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan di Kawasan Timur Indonesia (2015)

miskin melalui penguatan parlemen, kelompok perempuan, dan masyarakat. Program ini bekerja sama dengan 7 mitra (LSM) di kabupaten/kota dan satu kantor sub office BaKTI di Nusa Tenggara Barat (Mataram dan Lombok Timur). Wilayah Program MAMPU BaKTI adalah sembilan wilayah yang merupakan wilayah riset.

Untuk memperkuat APP sejumlah kegiatan dikembangkan dan dilakukan dalam bentuk pelatihan, workshop, dikusi, mentoring, dan bantuan teknis atau technical assistance (TA). Kegiatan-kegiatan tersebut dikembangkan berdasarkan rekomendasi dari hasil riset sebelumnya.

Pelatihan dan workshop yang telah dilakukan untuk APP dan APL champion antara lain: Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Tupoksi (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan Public Speaking. Pelatihanpelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/persepktif mereka terhadap tema-tema tersebut.

Tentu menghadirkan anggota DPRD untuk duduk dan serius mengikuti pelatihan dan workshop bukanlah perkara mudah. Selain mereka adalah anggota DPRD yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mereka juga mempunyai jadwal yang padat dan sulit dikompromikan. Karena itu, mitra-mitra Yayasan BaKTI membuat Nota Kesepahaman atau memorandum of

understanding (MOU) dengan Ketua DPRD dan Bupati/Walikota setempat.

Nota Kesepahaman tidak menjamin anggota DPRD untuk menghadiri undangan pelatihan atau workshop, tetapi telah menjadi salah satu ikatan moral bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung Program MAMPU yang dijalankan oleh BaKTI dan mitranya.

Strategi lain yang digunakan untuk menghadirkan anggota DPRD menghadiri kegiatankegiatan yang dikembangkan adalah BaKTI dan mitranya tidak mengundang langsung anggota DPRD untuk menjadi peserta,

tetapi menyampaikan permohonan kepada pimpinan DPRD untuk menugaskan anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan. Dengan begitu, setiap anggota DPRD yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan tidak mempunyai agenda lain. Tentu untuk mencari waktu yang tepat harus dikoordinasikan secara intens dengan Sekretaris DPRD.

Pembelajaran tersebut (Penugasan dari Ketua DPRD) berasal dari DPRD Parepare, yang kemudian dibagi kepada semua mitra BaKTI dalam Program MAMPU. Cara ini efektif karena, dalam dua terakhir (2014-2016), kegiatankegiatan BaKTI dan mitra yang melibatkan anggota DPRD tidak mengalami kendala lagi.

Untuk terus memperkuat dan menjaga agar APP dan APL yang telah dilatih menjadi wakil rakyat yang berpihak perempuan dan masyarakat miskin, maka dilakukan mentoring dan TA. Mentoring dan TA disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari APL/APL. Mentoring dan TA ini jugalah yang menyediakan sumber daya dan pendampingan bagi APP/APL yang menginisiasi lahirnya Kebijakan Publik yang Feminis.

Bersambung ke bagian ketiga. Di bagian ketiga nanti akan dibahas tentang lahirnya kebijakan publik yang feminis.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU dan dapat dihubungi melalui email ghufran@bakti.or.id

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

PLTBG RANTAU SAKTI

Limbah Berbahaya Yang Jadi Cahaya

Oleh **SYAIFULLAH**

angunan itu memang terlihat mencolok. Berada di antara pepohonan sawit, di atas lahan yang luasnya hampir dua hektar. Agak di belakang, sebuah benda hitam membumbung tinggi seperti bukit. Tingginya sekira 10 meter dari tanah, lebarnya 80m x 90m, dengan atap berbentuk trapesium dengan kapasitas 39.000 m3 yang tentu saja sangat menarik perhatian. Bangunan itu adalah reaktor atau pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) Rantau Sakti yang terletak di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.



PLTBg Rantau Sakti di Desa Rantau Sakti, berdiri ditengah hamparan pohon kelapa sawit yang juga menjadi bahan dasar untuk menghasilkan gas methan

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

"Waktu itu tingkat elektrifikasi kita memang rendah, daerah Tambusai Utara bahkan masih belum dialiri listrik PLN," kata . Nifzar, SP. M.Si, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu.

Nifzar, SP.M.Si kemudian melanjutkan, "Padahal Rokan Hulu punya potensi energi yang sangat besar dari perkebunan sawit. Kita punya 34 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam. Limbahnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas 1 MW."

Berdasarkan data-data itu, pemerintah daerah Rokan Hulu kemudian mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk membangun pembangkit listrik tenaga biogas. Pengusulan tersebut dilakukan mengingat biaya pembangunan yang sangat besar dan sulit ditanggulangi dengan biaya dari anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD).

Pengusulan pertama dilakukan tahun 2010 namun belum beroleh tanggapan. Dua tahun kemudian, Bupati Rokan Hulu kembali mengajukan pengusulan lewat surat bernomor 652/ DISTAMBEN- UM/2012 dan masih belum mendapatkan tanggapan. Tanggapan dari Kementerian ESDM baru muncul setahun berikutnya yaitu di tahun 2013.

"Kita berangkat dari komitmen pemerintah untuk membuat sebuah pembangkit dalam rangka mengatasi krisis listrik di Rokan Hulu," kata Drs. Yusmar, M.Si, kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu. Kala itu, menurut Drs. Yusmar, M.Si kondisi listrik di Rokan Hulu memang sangat memprihatinkan, ketersediaan listrik berada di bawah 60% dengan voltase yang rendah bahkan sampai di bawah 100 volt. Pemadaman bergilir selama dua jam bahkan lebih adalah makanan sehari-hari bagi mereka.

Lewat berbagai pertimbangan teknis, akhirnya diputuskan bahwa pembangkit listrik tenaga biogas akan dibangun di desa Rantau Sakti. Salah satu faktornya adalah kesiapan warga

PLTBg Rantau Sakti resmi beroperasi sejak 2014 dan awalnya melayani 1.050 Kepala Keluarga (KK). Jumlah ini terus bertambah hingga bulan April 2016 jumlahnya sudah mencapai angka 2.232 KK yang bukan hanya berasal dari Desa Rantau Sakti, tapi juga dua desa tetangga.

PLTBg yang menelan biaya lebih dari Rp.20 Miliar ini sebagian besar memang menggunakan dana pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta bantuan swadaya masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mulai membuat pengusulan ke Kementerian ESDM sejak 2010.



Rokan Hulu punya potensi energi yang sangat besar dari perkebunan sawit. Kita punya 34 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/ jam. Limbahnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan kapasitas 1 MW

dan aparat desa untuk ikut membantu pembangunan PLTBg serta ketersediaan lahan dan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS).

Komitmen lain yang didapatkan pihak Pemda Rokan Hulu adalah dari salah satu perusahaan kelapa sawit bernama PT. Arya Rama Prakasa yang bersedia menghibahkan pome (limbah kelapa sawit) selama 20 tahun tanpa imbalan apapun.

Proyek pembangunan PLTBg Desa Rantau Sakti ini adalah pilot project yang menurut Drs. Yusmar, M. Si sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No.10 tahun 2012 tentang pelaksanaan pembangunan fisik energi baru dan terbarukan. Pembangunannya pun diklaim sebagai usaha untuk mendorong pengembangan desa mandiri energi dan usaha

Reaktor yang ditutup oleh plastik yang membumbung ini menampung limbah olahan kelapa sawit yang kemudian menghasilkan gas methana. Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

pemerataan pembangunan infrastruktur energi di daerah terpencil.

Dalam masa setahun, pembangunan akhirnya selesai dan PLTBg Rantau Sakti bisa beroperasi. Peran serta masyakarat dalam pembangunan PLTBg Rantau Sakti tidak bisa dibilang kecil. Masyarakat melalui aparat desa Rantau Sakti menyumbangkan tanah seluas 1,5 Ha atau setara dengan nilai Rp. 450.000.000,sebagai lahan untuk pembangunan PLTBg.

"Mau bagaimana lagi? Ini komitmen kita untuk kesejahteraan masyakarat," kata Purwadi, kepala desa Rantau Sakti.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah kabupaten Rokan Hulu adalah di awal menyiapkan jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR) senilai Rp. 5 miliar serta swadaya dana pengelolaan dan pengoperasian PLTBg Rantau Sakti.

Secara sederhana, cara kerja PLTBg Rantau Sakti adalah sebagai berikut: limbah pengolahan kelapa sawit dialirkan dari PKS ke reaktor melalui sebuah pipa. Limbah itu kemudian diolah hingga menghasilkan gas methan yang dihimpun dalam sebuah reaktor yang ditutup oleh plastik. Reaktor ini cukup besar, lebarnya 80m x 90m dengan



ketinggian bubungan mencapai 10 meter dari tanah. Gas yang dihasilkan dari reaktor itu kemudian dialirkan ke sebuah mesin yang bertugas memilah gas yang akan menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan itulah yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk.

Status Yang Belum Terang

Setelah PLTBg Rantau Sakti resmi beroperasi, Kementerian ESDM lewat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) kemudian menyiapkan berita acara serah terima kepada Bupati Rokan Hulu lewat surat bernomor: 030/UN-DISTAMBEN/864 Tanggal 16 September 2014. Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Rokan Hulu dengan menyerahkan pengelolaan kepada kepala desa Rantau Sakti lewat surat bernomor: 540/DISTAMBEN-UM/525/2014 Tanggal 27 Oktober 2014. Surat ini sekaligus memberi wewenang kepada kepala desa Rantau Sakti untuk menindaklanjuti pengelolaan PLTBg Rantau Sakti.

Kepala desa Rantau Sakti pun merespon dengan membuat surat penetapan pembentukan tim pengelola sementara bernomor: 24 tahun 2014 Tanggal: 24 Desember 2014. Dengan demikian untuk sementara PLTBg dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rantau Sakti.

Rangkaian penyerahan PLTBg Rantau Sakti ini ternyata menyisakan kendala tersendiri di lapisan bawah atau pelaksana. Menurut peraturan daerah yang baru saja mengalami perubahan, hibah seperti itu harusnya diturunkan minimal sampai ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tingkat kabupaten, bukan tingkat desa seperti yang terjadi pada PLTBG Rantau Sakti.

"Mau tidak kementerian menjamin kalau BUMDES ini disamakan dengan BUMD? Sampai sekarang mereka belum bisa menjawab," kata Drs. Yusmar, M.Si. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah BUMDes mengelola aset bernilai puluhan miliar tersebut?

Dalam kondisi yang seperti ini, Dinas Pertambangan dan Energi Rokan Hulu mengaku belum melakukan audit keuangan terhadap operasional PLTBg Rantau Sakti. Untuk sementara pihak BUMDES Rantau Sakti masih diberi kekuasaan sepenuhnya untuk mengelola meski tetap diminta untuk membuat laporan.

Kesimpangsiuran ini juga diakui sebagai salah satu kendala oleh pelaksana operasional PLTBg Rantau Sakti. Purwadi, kepala desa Rantau Sakti yang sekaligus adalah penanggungjawab PLTBg Rantau Sakti juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya status PLTBg Rantau Sakti yang belum terang ini cukup menyulitkan mereka sebagai pengelola untuk mengambil langkahlangkah yang dianggap penting. Salah satunya adalah menyiapkan mesin cadangan yang akan membantu mesin yang beroperasi



sekarang.

"Mesin yang sekarang sudah dua tahun bekerja non stop. Tingkat kematian listrik kita dalam sebulan tidak lebih dari 24 jam. Kita harus bersiap-siap, usia mesin kan maksimal lima tahun, jika waktunya sudah sampai dan kita belum punya mesin cadangan, bagaimana nasib PLTBg ini?" ujar Purwadi.

Biaya penyediaan mesin cadangan yang dimaksud bukan biaya kecil. Minimal pengelola harus menyediakan paling kurang Rp.7,2 miliar. Dana ini tentu saja tidak bisa didapatkan begitu saja dengan cara menaikkan biaya listrik kepada pelanggan, misalnya.

"Sebenarnya kita bisa saja melakukan kerjasama dengan investor. Sudah ada beberapa investor yang tertarik. Tapi bentuk kerjasamanya bagaimana? Status kita belum jelas," kata Jaya Lingga Prasetyo, General Manager PLTBg Rantau Sakti.

Sampai sekarang PLTBg Rantau Sakti memang belum mempunyai SIUP dan SITU sehingga mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendukung pengembangan PLTBg Rantau Sakti.

"Untuk pinjam ke bank Rp.10 juta saja kita tidak bisa. Legalitas kita belum ada," kata Jaya Lingga Prasetyo lagi.

Ketidakjelasan status ini mungkin saja terjadi

Kalau soal manfaat tidak usah ditanya lagi, listrik di sini sudah tidak sekadar buat kehidupan sehari-hari tapi juga untuk kebutuhan usaha

PURWADI

karena PLTBG Rantau Sakti adalah pilot project yang mungkin di awal belum dibayangkan akan berjalan sempurna seperti sekarang. Karena pilot project maka bisa saja segala urusan legalitas dan payung hukumnya belum dipikirkan secara mendetail. Untuk menghibahkan secara penuh kepada pemerintah daerah juga bukan hal mudah. Kementerian ESDM harus meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan dan presiden Republik Indonesia, mengingat nilai asetnya yang di atas Rp. 10 miliar.

Kemandirian Energi Berkelanjutan

Meski mengaku masih kebingungan di sisi administrasi dan kejelasan status, pengelola PLTBg Rantau Sakti tidak patah semangat. Hingga saat ini mereka terus mengelola PLTBg Rantau Sakti secara profesional. Struktur organisasi jelas, pengelola dan penanggungjawab juga jelas dan operasional berjalan seperti layaknya sebuah



usaha profesional.

Semua ini adalah bentuk komitmen pengurus kepada masyarakat, khususnya yang sudah menikmati listrik dari PLTBg Rantau Sakti. Meski begitu, menurut Purwadi warga awalnya sempat curiga. Keterangan awal yang diterima mereka listrik PLTBg Rantau Sakti adalah sumbangan dari kementerian, tapi kenapa mereka tetap harus membayar listrik per bulan? Setelah diterangkan barulah mereka mengerti kalau untuk operasional mereka tetap harus membayar meski harganya jauh lebih murah dari harga listrik PLN. Untuk satu kWh warga hanya dibebani biaya Rp.1.900,-, jauh lebih murah dari harga listrik jika masyarakat menggunakan PLTD vang mencapai Rp.4.000,-/kWh.

"Kalau soal manfaat tidak usah ditanya lagi, listrik di sini sudah tidak sekadar buat kehidupan sehari-hari tapi juga untuk kebutuhan usaha," kata Purwadi.

Selain listrik, limbah dari PLTBg juga ternyata bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik. Saat ini, produksi pupuk organik yang dihasilkan oleh PLTBg sudah mencapai angka 8.000 liter per hari, padahal permintaan sudah mencapai 12.000 liter per hari. Ini yang disebut Jaya Lingga Prasetyo sebagai kemandirian energi yang berkelaniutan.

"Hasil dari kebun kelapa sawit diolah oleh

perusahaan menjadi beberapa produk, limbahnya kami ambil untuk menjadi bahan bakar biogas di PLTBg. Hasilnya menjadi listrik untuk warga, nah limbahnya lagi kita olah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan petani untuk menyuburkan kelapa sawit mereka," terang Jaya Lingga Prasetyo.

Belum jelasnya status pengelolaan PLTBg Rantau Sakti memang masih jadi satu kendala yang cukup mengganjal bagi pengelola. Namun, itu tidak menyurutkan niat mereka untuk terus menjaga, merawat dan mengelola PLTBg Rantau Sakti. Sebagai pilot project, PLTBg Rantau Sakti bisa dianggap berhasil. Selain memanfaatkan limbah berbahaya yang merupakan energi baru dan terbarukan, mereka pun memberi bukti bahwa desa juga bisa mandiri energi termasuk mandiri dalam pengelolaannya.

Slogan "limbah berbahaya menjadi cahaya" yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Rokan Hulu bukan tanpa alasan. Dengan slogan itu mereka memberi bukti, limbah sawit yang dianggap berbahaya toh bisa juga diolah menjadi cahaya yang menerangi warga.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



KEGAGALAN SISTEM KESEHATAN DI PAPUA

BAGIAN 2

Oleh Bobby Anderson



Kesehatan masyarakat Papua



idak tersedianya layanan kesehatan ini terjadi di provinsi yang memiliki tingkat harapan hidup terendah di Indonesia. Tingkat harapan hidup penduduk asli Papua menunjukkan angka yang signifikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan populasi migran atau pendatang yang mendekati angka nasional. Para penduduk migran atau pendatang umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, di mana sistem layanan kesehatan masih berfungsi.

Sebaliknya penduduk asli Papua umumnya berada di wilayah perkampungan yang terpencil di mana sistem lavanan kesehatan tidak berjalan.

Permasalahan kesehatan yang paling signifikan yang dihadapi oleh penduduk asli Papua bukanlah seperti yang menjadi perhatian utama di media nasional maupun internasional. HIV/AIDS adalah masalah yang cukup penting, tetapi itu bukanlah ancaman utama kesehatan masyarakat. Data statistik yang diperoleh di Papua seharusnya dijadikan referensi dan dimanfaatkan secara bijak dan berhati-hati, dan angka untuk wilayah pegunungan seharusnya berlipat ganda dari yang tercatat. Bagaimanapun juga, angka yang keluar dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa Papua menduduki ranking terendah di hampir semua indikator pembangunan sumber daya manusia.

Mari kita mulai dengan kondisi kaum muda: penduduk asli Papua memiliki angka kematian bayi, anak dan ibu tertinggi di Indonesia. Laporan awal dari Survei Kesehatan dan Demografi tahun 2012 yang dilakukan oleh Kemenkes (Kementrian Kesehatan), BKKBN dan instansi lain menunjukkan bahwa: di Papua 40 persen bayi dilahirkan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, di Jakarta angakanya adalah 99 persen; Di Papua 27 persen bayi dilahirkan di fasilitas kesehatan, sedangkan di Jakarta angkanya adalah 96 persen.

Laporan ini secara jelas menunjukkan gambaran negatif, angka kematian anak baik di provinsi Papua maupun Papua Barat, khususnya bila dibandingkan dengan Jakarta. Di Jakarta, 22 dari 1000 bayi meninggal, tetapi di Papua, angka ini meningkat menjadi 54, dan di Papua Barat angka ini meningkat menjadi 74. Di Jakarta, hanya 31 dari 1000 anak dibawah lima tahun yang meninggal, tetapi di Papua Barat angka ini naik menjadi 109 dan di Papua menjadi 115.

Survei kesehatan melaporkan adanya indikasi tingginya angka kematian neonatal (1-30 hari), post-neonatal (30 hari – 1 tahun), dan bayi (diatas 1 tahun) di provinsi Papua Barat dibandingkan Papua, yang mana cukup mengherankan karena permasalahan pelayanan kesehatan di sana tidak sesulit di wilayah Papua. Saya yakin bahwa laporan di wilayah Papua itu tidak realistik. Saya dan juga orang-orang yang telah menghabiskan banyak waktunya di wilayah terpencil di Papua dan Papua Barat beranggapan bahwa provinsi yang disebutkan terakhir menunjukkan hasil

yang keliru bahwa angka kematian neonatal, post-natal dan bayi lebih tinggi karena peneliti memiliki akses yang lebih baik untuk melakukan penghitungan angka kematian tersebut. Bukan berarti bahwa Papua memiliki angka kematian yang lebih rendah di kategori tersebut. Namun lebih karena Papua Barat lebih baik dalam melakukan penghitungan kematian.

Angka tersebut juga dibelokkan karena mereka memasukkan kota dengan penduduk paling besar dan perkampungan yang paling terpencil. Bayi yang lahir di Jayapura dan bayi yang lahir di Sinokla tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk bertahan hidup sampai umur lima tahun: perbedaannya sangat besar seperti mereka lahir di benua yang berbeda.

Angka kematian semakin buruk di wilayah terpencil di mana angka statistik tersedia. LSM dari Perancis, Medecins du Monde yang bekerja di Puncak Jaya sampai saat ini, salah satu wilayah yang sangat terpencil di pegunungan, dan satusatunya wilayah dengan kehadiran OPM yang cukup aktif. Di tahun 2008 mereka memperkirakan angka kematian bayi antara 85-150 per 1000 kelahiran hidup di kabupaten. Dan bagaimana bayi dan anak-anak tersebut meninggal; penyebab utama adalah karena infeksi saluran nafas akut (khususnya pneumonia), yang diikuti oleh diare dan malaria. Penyebab kematian ini sangat umum di masyarakat kampung sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Penyebab utama kematian lainnya adalah malnutrisi: di wilayah pegunungan dan dataran rendah yang terpencil, hal ini terlihat sangat jelas di setiap kelompok anak-anak, dari perut mereka yang buncit dan kaki yang kurus. Ibu yang biasanya meninggal saat melahirkan, umumnya disebabkan karena perdarahan atau infeksi neonatal (neonatal sepsis), dan malnutrisi yang secara tidak langsung berkontribusi dalam penyebab kematian ini juga, khususnya karena adanya anemia dan lemahnya sistem imun.

Prevalensi malnutrisi di provinsi Papua (yang diukur berdasarkan berat badan dan umur) adalah 21.2 persen lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 18.4 persen. Di wilayah pegunungan, angka ini kemungkinan bisa mencapai 40 persen. Malnutrisi bukanlah semata-mata keadaan kelaparan. Untuk anakanak, keadaan ini dapat menyebabkan lemahnya



sistem imun, menghambat proses pertumbuhan (stunting/pendek) dan juga menghambat perkembangan mental dan kognitif.

Parasit merupakan salah satu penyebab utama malnutrisi: anak-anak harus bersaing untuk sejumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cacing yang ada dalam tubuh mereka. Semua kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan akses ke air bersih, rendahnya kebersihan dan sanitasi yang tidak memadai. Dasar dari kondisi dan praktik yang buruk ini adalah karena kurangnya pengetahuan, yang merupakan hasil dari disintegrasi antara infrastruktur pendidikan dan kesehatan selama bertahun-tahun.

Beberapa kondisi malnutrisi di wilayah pegunungan bukanlah disebabkan karena kurangnya bahan pangan: namun lebih karena jenis makanan yang disiapkan untuk anak-anak. Proses menyusui seringkali berakhir terlalu dini ketika bayi dan makanan tambahan diberikan terlalu dini. Ibu-ibu mulai memberikan makanan seperti sagu saat bayi baru berumur beberapa minggu, dan hal ini sangat berbahaya untuk bayi. Poltekes Gizi Jayapura melakukan penelitian terkait dengan praktik pemberian makanan terhadap bayi dan anak di kabupaten Jayapura pada tahun 2012. Penelitian itu menunjukkan Sampah medis di Bonohaik, kecamatan Lolat, kabupaten Yahukimo. Bila dalam keadaan kering, sampah itu dibakar. Kondisi dalam gambar jauh lebih baik dibandingkan di wilayah lain, dimana sampah medis dibuang dan ditumpuk begitu saja, dan seringkali dimakan oleh babi. **Foto Bobby Anderson**

bahwa beberapa bayi dan anak dari keluarga yang paling miskin justru paling sehat, hal ini terjadi karena keluarga tidak mampu membeli makanan tambahan dan harus bergantung pada ibu menyusui. Hal ini merupakan pengaruh baik terhadap program menyusui, namun setelah usia 6 bulan, makanan tambahan tetap diperlukan.

Perawatan untuk calon ibu, memonitor kehamilan dan juga berat badan dan kesehatan bayi, imunisasi serta proses belajar dan mengajar, biasanya dilakukan melalui kegiatan Posyandu yang dulu sempat dilaksanakan di kampungkampung di wilayah Papua. Ketika imunisasi dan pelayanan kesehatan lainnya berhenti, penyakit campak mulai muncul kembali. Vaksinasi polio juga terhenti dan saat ini hanya kurang dari setengan atau 50 persen anak yang mendapatkan vaksinasi. Di wilayah pegunungan, umumnya anak-anak tidak mendapatkan imunisasi.

Di banyak kabupaten baru, belum pernah ada pelaksanaan imunisasi sejak kabupaten tersebut

berdiri. Imunisasi berakhir di kabupaten baru Yahukimo sejak tahun 2002, sebulan setelah kabupaten tersebut resmi berdiri, saat mekanisme rantai imunisasi (cold chain) terputus atau rusak. Vaksin rusak dalam suhu ruangan. Diduga beberapa kasus polio mulai muncul di wilayah tersebut, di Sumo dan beberapa daerah lainnya.

Epidemi tuberculosis (TB)

Tuberkulosis (TB) adalah ancaman kesehatan masyarakat yang lebih berat dibandingkan HIV/AIDS: karena penyakit ini menyebar melalui aerosol ludah (percikan ludah yang melayang di udara), dan sangat mudah ditularkan, tidak hanya dengan batuk atau bersin tetapi juga pada saat berbicara. Mereka yang tinggal atau bekerja di lingkungan sekitar orang yang terinfeksi TB memiliki 22 persen peluang untuk tertular. Namun program TB termasuk program yang dananya kurang dibandingkan dengan program sepert HIV/AIDS. Papua memiliki tingkat penularan tertinggi di Indonesia. Yayasan yang bergerak di bidang kesehatan di Wamena memperkirakan sekitar 10 persen angka penularan di kota Wamena. Di area pegunungan sekitarnya, kemungkinan angkanya lebih tinggi.

Kalvari, salah satu klinik swasta di Wamena, telah dikenal secara luas sebagai pusat pemeriksaan dan pengobatan TB di wilayah pegunungan tengah: hampir semua pelayanan kesehatan di kabupaten merujuk pasien kesana, dan pasien datang dari Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Nduga dan Yalimo menempuh perjalanan yang cukup jauh selama berhari-hari untuk mencapainya.

Kalvari mulai melakukan tes terhadap pasien TB di klinik mereka dan mereka menemukan bahwa 50 persen dari pasien TB juga positif HIV: ko-infeksi merupakan hal yang umum terjadi pada pasien HIV karena sistem imun mereka melemah sehingga mudah terkena infeksi. Kurangnya pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap terjadinya epidemik ini. TB didiagnosa melalui pemeriksaan mikroskopik dahak, dalam hal ini hanya Kalvari dan beberapa pelayanan kesehatan yang mampu melakukan tes tersebut di wilayah pegunungan, hal ini membuat proses diagnosa TB menjadi sangat



Buku pasien dan daftar obat-obatan yang dibagikan di Bonohaik, kecamatan Lolat. Ini merupakan salah satu klinik kesehatan terbaik yang di kelola oleh relawan di wilayah pegunungan. **Foto Bobby Anderson**

terbatas.

Selain itu kualitas dan akurasi deteksi TB juga sangat tergantung pada tingkat kesalahan, yang mana juga dipengaruhi oleh kualitas peralatan yang digunakan untuk tes seperti mikroskop dan reagen yang digunakan. Kadang petugas yang sudah sangat terlatih pun memiliki tingkat kesalahan 25 persen. Perawatan untuk TB membutuhkan waktu cukup lama dan membutuhkan pengawasan: obat-obatan harus disediakan paling tidak untuk jangka waktu setahun.

Protokol terapi yang diterapkan Kalvari untuk pasien TB menunjukkan bahwa tidak mungkin menyediakan pelayanan ini tanpa adanya dukungan dari dinas kesehatan di tingkat kabupaten. Pasien TB yang datang ke Kalvari diminta untuk tinggal di Wamena selama 2 bulan pertama untuk terapi yang berkelanjutan, dan mereka juga membantu mencarikan hostel untuk pasien yang tidak memiliki keluarga di Wamena.

Setelah dua bulan, dan pemeriksaan dahak kedua, pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya masih positif harus tinggal selama satu bulan lagi di Wamena. Setelah itu tes lanjutan akan dilakukan, dan bila setelah satu bulan mereka masih juga positif, maka mereka akan mendapatkan perawatan yang lebih intensif lagi. Kalvari bekerja dalam skala kecil sehingga menjadi hambatan untuk merawat lebih banyak lagi pasien yang menderita TB dengan dengan pelayanan seperti yang dijelaskan di atas.

Pasien yang menunjukkan hasil negatif setelah pengobatan awal selama 2 bulan akan melanjutkan ke fase berikutnya: mereka akan pulang kerumah dengan persediaan obat-obatan untuk satu bulan berikutnya. Untuk pasien yang tinggal di luar kabupaten Jayawijaya, Kalvari akan merujuk pengobatan dan pengecekan dahak mereka ke Puskesmas yang berfungsi di wilayah kabupaten mereka yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal pasien. Namun, meskipun dengan 2 bulan pengobatan awal dan edukasi yang cukup komprehensif oleh petugas kesehatan dari Kalvari mengenai pentingnya untuk menyelesaikan pengobatan TB, tingkat putus obat masih cukup tinggi yaitu berkisar 15 sampai 45 persen. Alasan untuk tidak melanjutkan pengobatan cukup beragam. Pada banyak kasus, setelah menerima pengobatan selama beberapa bulan, pasien umumnya merasa sehat, dan tanpa adanya sistem pengawasan maka mereka putus obat. Efek samping obat juga menjadi salah satu alasan mengapa pasien memutuskan berhenti: nyeri tulang dan kencing yang berwarna merah merupakan keluhan yang umum terjadi. Namun penyebab terbesar putus obat adalah terkait ketersediaan obat: seringkali Puskesmas tidak memiliki obat-obatan yang dibutuhkan, atau kadang mereka hanya punya persediaan obat untuk beberapa hari saja.

Beberapa LSM telah mencoba membantu dengan program pengawasan masyarakat, namun aspek yang utama-suplai obat-terlalu kacau untuk menunjukkan bahwa pelaksaan program seperti ini dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan. Selain itu, adalagi hal yang lebih buruk terkait dengan kurangnya ketersediaan obat di beberapa wilayah: adalah merupakan mandat bahwa obatobatan TB ini disediakan secara gratis. Obatobatan ini oleh beberapa orang seperti petugas kesehatan yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara menjual obat-obatan tersebut ke apotik swasta yang kemudian menjual kepada pasien.

Kasus TB resisten obat (MDR/Multi Drug Resistant) menjadi meningkat dengan semakin banyaknya putus obat. Indonesia secara nasioal cukup kesulitan dalam menangani kasus MDR: Indonesia baru mulai menangani masalah ini sekitar tahun 2009 dan sejak saat itu telah dibuka 10 pusat layanan TB MDR. Di Jayapura, 20 kasus telah terdeteksi dan 11 di antaranya telah meninggal. Bahaya terbesar adalah ketika pasien TB MDR gagal untuk menyelesaikan pengobatan yang akan menyebabkan terjadinya total resiten terhadap obat (Extensive Drug Resistance) atau TB XDR. Proses pengobatan untuk saat ini, yang telah banyak membunuh pasien adalah pengobatan selama 2 tahun. Dan satu-satunya pengobatan untuk yang terakhir adalah isolasi sampai meninggal. Kemungkinan munculnya TB XDR di wilayah pegunungan sangatlah dekat.

HIV/AIDS

Penduduk Papua memiliki angka HIV/AIDS yang paling tinggi di Indonesia, dan Papua merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan infeksi HIV yang paling cepat di Asia. Menurut UNDP, 2.4 persen masyarakat Papua terinfeksi HIV, di mana angka nasional adalah 0.2 persen. Penduduk pendatang yang menderita HIV memiliki angka kesakitan mendekati angka nasional. Persentase terbesar infeksi adalah pada masyarakat asli Papua.

Pada tahun 2007, Badan pengembangan milik Australia (Australian development agency/AusAID), telah memperkirakan bahwa pada tahun 2025, angka HIV di Papua akan meningkat menjadi 7 persen, dibandingkan angka nasional yaitu 1.8 persen. Namun, petugas kesehatan di Wamena telah memperkirakan prevalensi penyakit HIV akan mencapai angka antara 8 ke 10 persen di wilayah mereka. Tingkat HIV di area sangat terpencil di wilayah pegunungan tidak diketahui, namun jumlah lakilaki muda, perempuan dan anak-anak yang meninggal karena penyebab yang tidak diketahui secara jelas yang di luar proporsi yang seharusnya dari sebuah provinsi: hal ini diduga karena HIV.

Para lelaki bekerja di wilayah perkotaan di

bidang konstruksi bagian dari pembangunan yang marak karena proses pemekaran kabupaten-kabupaten baru dan juga dana yang berasal dari dana otonomi khusus yang mengalir cukup besar dan banyak digunakan untuk pembangunan, menyebabkan banyaknya penularan HIV melalui pelacuran. Wamena, Timika dan kota-kota lainnya berperan sebagai area penularan untuk penyakit ini dan juga penyakit menular seksual lainnya. Data surveilans dari Kemenkes yang dikumpulkan tahun 2011 (IBBS) menunjukkan bahwa 25 persen dari pekerja seksual di Wamena positif HIV, dan 35.4 persen terinfeksi gonore, 31.4 persen menderita sifilis dan 44.8 persen menderita klamidia. Secara umum transaksi seksual melibatkan pekerja seksual yang tidak aman, dengan beberapa pengecualian usaha (kepercayaan lokal) untuk mengurangi risiko: seperti para laki-laki melukai dirinya untuk mengeluarkan darah kotor setelah mengunjungi pekerja seksual.

Penyediaan wanita penghibur atau pekerja seksual sebagai hadiah di jaringan yang dilindungi pegawai pemerintahan saat ini menjadi hal yang biasa atau standar, dan hal ini mungkin bisa membantu menjelaskan adanya bukti anekdot yang menunjukkan bahwa lakilaki Papua yang paling cepat tertular HIV adalah para pegawai negeri: seperti kepala kampung, anggota komisi pemilihan umum, dan seterusnya. Di kecamatan Ninia yang merupakan bagian dari kabupaten Yahukimo, kampung halaman Bupati yaitu Balingama/Yabi memiliki angka HIV yang tertinggi saat diidentifikasi oleh LSM lokal yang bekerja di wilayah tersebut.

Faktor lain yang ikut mendukung tingginya tingkat penularan adalah budaya dan kepercayaan lokal yang masih menerima pemerkosaan sebagai hak prerogatif laki-laki untuk dianggap kuat: di survey terbaru yang dilakukan oleh lembaga berbasis gereja di Tolikara, mayoritas perempuan muda mengaku bahwa hubungan seksual pertama mereka adalah karena pemaksaan.

Banyak lelaki yang bekerja di luar kampung mereka kembali pulang dengan membawa penyakit. Dan karena tidak adanya sistem pelayanan kesehatan di lokasi ini, akibat terburuk yang dapat ditimbulkan sangat terasa. Contohnya, prevalensi penyakit menular seksual

mungkin dapat membantu menjelaskan beberapa kasus infertilitas di wilayah pegunungan baik pada pria maupun wanita, yang dicatat oleh beberapa LSM yang bergerak di bidang kesehatan sebagai hal yang mulai banyak terjadi dan patut dipertimbangkan.

Untuk mereka yang benar-benar mencari pertolongan untuk mengobati HIV melalui terapi ARV (Obat anti viral), ketersediaan obat cukup sulit, bahkan kadang di Jakarta. Di Papua, sangat sulit untuk menjaga ketersediaan obat ARV kecuali mereka sangat kaya. Sementara di belahan dunia lain HIV termasuk penyakit yang dapat dikelola, di Papua – dan khususnya di wilayah pegunungan - kondisi ini merupakan hukuman mati untuk beberapa orang. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di tulisan dan foto karya Carole Reckinger dan Antoine Lemaire mengenai HIV di Papua.

Bukti anekdot mengindikasikan bahwa hampir semua orang papua yang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan AIDS tidak menyadari bahwa mereka mengidap HIV. Begitu pula dengan keluarga mereka. Di perkampungan di wilayah pegunungan saya mendengar kasus demi kasus tentang suami istri yang masih cukup muda meninggal karena penyakit yang tidak diketahui, dan diikuti juga oleh kematian anak-anak mereka.

Untuk penduduk Papua yang telah didiagnosa, gagasan tentang kerahasiaan pasien tidak ada: kondisi mereka yang positif HIV mungkin akan tersebar di masyarakat dan lingkungannya. Dan mereka sangat ketakutan akan stigma, dimana masyarakat dan keluarga akan segera menjauhi orang-orang yang terkena HIV. Gereja lokal mengkhutbahkan bahwa HIV merupakan hukuman Tuhan bagi yang berbuat dosa. Media spiritual yang digambarkan bedasarkan kepercayaan sebelum Kristen, mengajarkan bahwa HIV/AIDS merupakan hasil, bukan karena tidakan atau perilaku, melainkan akibat kutukan yang dapat disembuhkan melalui cara-cara spritual yang dapat menggagalkan kutukan tersebut.

Bersambung ke bagian ketiga

INFORMASI LEBIH LANJUT

Bobby Anderson (rubashov@yahoo.com) bekerja di bidang kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Indonesia Timur, dan dia sering mengunjungi provinsi Papua. Artikel ini dan juga artikel lainnya dapat ditemukan di http://independent.academia.edu/BobbyAnderson/

Batukarinfo.com

Artikel

Meningkatkan Kelembagaan Urusan Perempuan dan Anak

oleh Ibrahim Fattah & M. Ghufran H. Kordi K.

Sebagian besar masyarakat dan aparat pemerintah menganggap bahwa, urusan perempuan dan anak adalah urusan kecil atau urusan ecek-ecek. Anggapan ini berasal perspektif atau pandangan yang keliru yang berakar dari masyarakat patriarki yang memandang rendah terhadap perempuan dan anak. Perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, sedangkan anak semakin menjauh karena berada di kelas tiga setelah laki-laki dan perempuan dewasa.

Karena dianggap rendah dan jauh secara sosial dan budaya, maka perempuan dan anak dijauhkan dari pusaran kebijakan. Perempuan dan anak tidak selalu dihitung dalam kebijakan, kecuali untuk hal-hal yang dianggap penghias dan pelengkap. Makanya sejak dulu, sebagian besar program pemerintah maupun organisasi sosial untuk perempuan dan anak, tidak pernah jauh dari menjahit, memasak, merawat anak, mengurus rumah, dan sejenisnya.

Paradigma berubah ketika pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pemerintah hendak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkelurga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun jalan menuju pencapaian kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dan tidak mulus.

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/meningkatkankelembagaan-urusan-perempuan-dan-anak

Muli, Gurunya Para Ibu

Oleh Agusnawati & M. GHUFRAN H. KORDI K.

Bagi aktivis dan pendidik kritis, nama Paulo Freire dan Ivan Illich adalah maha guru untuk pembebasan. Istilah konsientisasi (contiencizacao) atau penyadaran adalah istilah yang populer dan melekat dengan Paulo Freire. Baik Paulo Freire maupun Ivan Illich menekankan bahwa, pendidikan harus meningkatkan daya kritis, memberdayakan, membebaskan, dan memanusiakan.

Karenanya, manusia sekolah adalah manusia-manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih kritis dan tidak membebek, tidak menjadi pengikut buta. Lebih berdaya dan mempunyai kekuatan untuk melawan diskriminasi, penindasan, dan kesewenangwenangan, sehingga menjadi manusia bebas dan merdeka dari ketakutan dan eksploitasi dalam bentuk apa pun.

http://batukarinfo.com/komunitas/articles/muli-gurunyapara-ibu

Referensi

PENURUNAN KETIMPANGAN Pandaan Teinic Gadi 10 SDGs Untuk Permerinth Davar ah Pernangku Repertingan Davrah **None Teinic Gadi 10 SDGs **None Teinic Gadi **None Tei

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

Publikasi Infid (International NGO Forum on Indonesian Development)

Dengan disahkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals atau SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, semua negara termasuk Indonesia, terikat secara sosial dan konvensional untuk melaksanakan 17 Tujuan dan 169 Sasaran dari SDGs. Tidak hanya pemerintah pusat, pelaksanaan SDGs juga melibatkan peran aktif pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, termasuk swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas pada umumnya. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebagai organisasi masyarakat sipil, yang turut andil dalam proses penyusunan SDGs, memandang penting untuk melakukan sosialisasi kesepakatan pembangunan global tersebut kepada masyarakat luas. Selain itu, INFID turut mengambil peran dalam memberi masukan kepada pemerintah pusat dan daerah tentang rencana aksi SDGs.Untuk itulah, INFID menerbitkan buku panduan ini.

http://batukarinfo.com/referensi/penurunan-ketimpangan-panduan-teknis-goal-10-sdgs-untuk-pemerintah-daerah-dan-pemangku

Booklet Profil Proyek Kemakmuran Hijau

Proyek Kemakmuran Hijau atau Green Prosperity Project adalah sebuah proyek yang dinaungi Compact Indonesia dengan Millenium Challenge Corporation (MCC) dan Millenium Challenge Account (MCA). Proyek ini bertujuan mendorong pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal di Indonesia dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikehidupan rumah tangga serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pada emisi gas rumah kaca berbasis lahan.

http://batukarinfo.com/referensi/booklet-profil-proyek-kemakmuran-hijau

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com

Kegiatan di BaKTI



11 OKTOBER 2016 Seminar Reading & Writing IELTS

Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI), organisasi alumni Pertukaran Pemuda Antara Negara chapter Sulawesi Selatan mengadakan acara PCMI Berbagi yang rutin dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang berbeda. Jika sebelumnya temanya adalah informasi beasiswa ke luar negeri, maka pada tanggal 11 Oktober 2016 bertempat di kantor BaKTI Makassar dilaksanakan kegiatan pengenalan IELTS (International English Language Testing System) yang diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai institusi secara gratis.

adan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bertempat di Kantor BaKTI Makassar. Hadir sebagai narasumber, Spesialis Gender Dr. Novaty Eni Dungga, Abd. Naris Agam dan Dr.Lumu Taris. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender tahun Anggaran 2016 serta untuk memberikan rujukan pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG di Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Sebanyak 30 peserta perwakilan 14 Kecamatan dan Perwakilan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengikuti kegiatan ini.

12 OKTOBER 2016

Koordinasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender





28 OKTOBER 2016

Diskusi Inspirasi BaKTI "Anak muda menyulap minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel lewat wirausaha sosial" ayasan BaKTI kembali menggelar kegiatan Diskusi Inspirasi BaKTI dengan menghadirkan 2 orang anak muda yang menyulap minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel lewat wirausaha social. Kedua anak muda ini adalah Hilmi Muttawakil dan Fauzy Ihza Mahendra dari GEN Oil.

Hilmi dalam paparannya menjelaskan selain dampak ekonomi, kegiatan GEN Oil juga memberikan dampak sosial berupa pemberdayaan mantan preman yang dirangkul dan dijadikan mitra usaha sebagai pegawai lepas pengumpul minyak jelantah dari restoran, mall dan cafe seharga Rp.2.000 per liter. Inilah yang menghantar GEN Oil menjadi pemenang Ideafest 2016, sebuah kompetisi bergengsi bagi social entreprise dalam menginspirasi anak anak muda. Kegiatan Diskusi ini dihadiri oleh 40 peserta berasal dari unsur pemerintah, LSM lokal dan nasional, mahasiswa, media, mitra pembangunan internasional, blogger dan masyarakat umum.





Mengolah dan Membuat Interpretasi Hasil Olahan SPSS untuk Penelitian Ilmiah

PENULIS Dr. Mohammad Faisal Amir

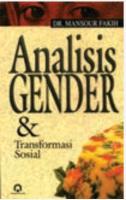
SPSS (Statistical Package for the Social Science) adalah salah satu aplikasi komputer yang digunakan oleh para peneliti dalam bidang ilmu sosial. Dengan SPSS pengguna dapat mengolah data statistik yang selanjutnya dapat dianalisis dan dijadikan dasar dalam mebuat interpretasi atas hasil penelitian tersebut. Buku ini berisi materi pemahaman statistika secara komprehensif yang ditulis dengan rinci dan mendalam untuk mendukung pengolahan data dengan SPSS.



Gadis Gurun

PENULIS Paox Ibhen Mudhaffar

Gadis gurun adalah sebuah novel yang berkisah tentang perjalanan seorang insinyur muda dari Indonesia yang bekerja di pengeboran minyak di gurun Wahiba Oman. Dalam petualangannya di gurun ini diceritakan pula tentang fakta-fakta menarik tentang konflik politik, agama, kebudayaan dan perminyakan di kawasan timur tengah yang dikomparasikan dengan beberapa fakta keindonesiaan.



Analisis Gender dan Transformasi Sosial

PENULIS Dr. Mansour Fakih

Dalam buku ini, DR. Mansour Fakih mencoba menyajikan secara sederhana apa sebenarnya analisis gender. Namun dalam buku ini penulis tidak berambisi mengupas segala macam analisis sosial dari persepektif konsep gender. Penulis lebih berminat memaparkan pengertian kepada pembaca, yang bersifat pengantar, untuk memahami masalah-masalah emansipsipasi perempuan dalam kaitannya dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam konteks yang luas.



Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan

PENULIS NK. Endah Triwijati & Bekti Dwi Andari

Persoalan reproduksi dan seksualitas perempuan merupakan kumpulan dari pelbagai kompleksitas yang harus diungkapkan untuk diketahui banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Berangkat dari kondisi ini maka buku ini mencoba memaparkan dengan lebih gamblang tentang pelbagai persoalan reproduksi dan seksual perempuan berikut hak-hak yang mengiikutinya dalam bentuk format tanya jawab yang sederhana.